LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : TAHUN
TENTANG :
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, juga menyusun Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Fungsi dari Renstra Dinas Kesehatan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang;
2. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Malang di masa mendatang selama 5 (lima) dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang;
3. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pembangunan kesehatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
4. Sebagai bahan penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi dengan memanfaatkan peluang dan potensi organisasi yang ada, sehingga bersifat adaptif dan fleksibel;
5. Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan prima (*excellence service*) karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi;
6. Untuk meningkatkan komunikasi diantara semua unsur yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 berakhir dan akan dilaksanakan pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana hasil Pilkada yang telah dilaksanakan. Sejalan dengan telah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Malang periode tahun 2018-2023 maka dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Bersamaan dengan telah

ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018 – 2023 dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 pada tanggal 2 Maret 2019, semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang termasuk Dinas Kesehatan juga harus menyusun Renstra Dinas Kesehatan untuk periode tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023.

Disamping memperhatikan tupoksi Dinas Kesehatan, dalam proses menyusun Renstra harus berpedoman dan memperhatikan peraturan yang mengaturnya antara lain : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (4) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari visi, misi serta prioritas program dan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana telah disampaikan pada saat proses Pilkada yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang 2018-2023. Dokumen renstra Dinas Kesehatan kesehatan juga harus bersinergi dengan Renstra Kementrian teknis yaitu Kementrian Kesehatan, juga dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang 2018 – 2023, juga harus menjadi pedoman sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan per tahun, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan selama periode 2018-2023

1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018 - 2023.

1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila

1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar 1945

1.2.3. Landasan Operasional :

a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
h. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
j. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018 – 2023;
l. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2018 - 2023 adalah menjabarkan perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 - 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023, adalah untuk memberikan arah bagi pembangunan Kesehatan Tahun 2018 - 2023 serta merupakan Pedoman Teknis dan strategi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Malang

1. 4. Sistematika Penulisan

Garis besar Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018 - 2023 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota. Dengan permasalahan yang ada, tupoksi perangkat daerah yang disandingkan dengan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD. Apabila perangkat daerah tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi;
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada

bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
2) pengelolaan upaya kesehatan;
3) pendayagunaan tenaga kesehatan;
4) pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
5) pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan;
6) pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang kesehatan;
7) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
8) pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
9) pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
10) pelaksanaan promosi kesehatan;
11) pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
12) pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
13) pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;
14) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
15) pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
16) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
17) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
18) pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
19) pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
20) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; dan
21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang kesehatan.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
2) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
3) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
4) pelaksanaan program Sekretariat Dinas;

5) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Dinas;
6) pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
7) pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
8) pengoordinasian dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan;
9) penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kesehatan;
10) pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
11) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Subbagian Perencanaan mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
2) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
3) pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
4) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
2) pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3) penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
5) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga,

perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
2) penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
3) penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
4) penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
5) penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
6) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
7) penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
8) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
9) penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10) pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
11) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan dan fasilitas kesehatan serta akreditasi pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan program Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan perencanaan strategis;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
3) pengoordinasian penerbitan perizinan operasional fasilitas kesehatan;
4) pengoordinasian penerbitan perizinan operasional fasilitas kesehatan;
5) pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pencatatan (registrasi) dan penilaian (akreditasi) bagi rumah sakit milik Daerah, pusat kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;

6) pemantauan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
7) pengoordinasian penetapan tarif pelayanan kesehatan;
8) pembinaan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai kondisi kota;
9) pengoordinasian kerjasama dalam negeri bidang pelayanan kesehatan;
10) pengoordinasian pengendalian kegiatan bidang pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan kesehatan primer.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer;
3) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, prosedur tetap pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan klinik swasta dan laboratorium klinik;
4) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penetapan tarif pelayanan kesehatan;
5) rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan analisis, kajian dan pengembangan pelayanan kesehatan primer;
6) pelaksanaan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan primer;
7) penyiapan bahan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
8) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pelayanan kesehatan primer;
9) pengumpulan dan penyusunan bahan pendataan, pencatatan (registrasi), dan akreditasi bagi pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
10) penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang registrasi, perizinan, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer;
11) pemberian pertimbangan teknis izin fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;

12) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian izin opersional fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi pusat kesehatan masyarakat, laboratorium pratama, klinik, apotek, dan optik;
13) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
14) Penyiapan bahan guna penapisan Ilmu Pengetahunan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pelayanan kesehatan;
15) penyiapan perumusan dan pelaksanaan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
16) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
17) pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan kesehatan primer;
18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer;
19) penyiapan bahan peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer;
20) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supevisi, pemantauaan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
3) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan;
4) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;
5) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi serta pemantauan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit;
7) pengumpulan dan penyusunan bahan guna penyusunan petunjuk teknis, prosedur tetap pelayanan kesehatan rujukan;
8) pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;

9) penyiapan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai kondisi kota;
10) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, meliputi rumah sakit kelas C dan D serta rumah sakit swasta yang setara;
11) pengumpulan dan penyusunan bahan pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;
12) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
13) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
3) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional;
4) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional terkait dengan kepemilikan surat terdaftar penyehat tradisional dan surat lain Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
5) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kepada seluruh Puskesmas serta berkoordiansi dengan Organisasi Profesi/Sekolah Kesehatan dan Non Kesehatan/Tokoh Masyarakat dan Perangkat Daerah yang terkait terhadap kegiatan Tanaman Obat Keluarga/TOGA;
7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan program Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan perencanaan Strategis Dinas Kesehatan;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengen dalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3) pengamatan/surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
4) penelitian kemungkinan terjadinya KLB dan wabah penyakit;
5) penyiapan bahan pembinaan dalam rangka surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
6) penyiapan bahan koordinasi dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta wabah penyakit;
7) penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
8) pengelolaan sarana dan prasarana surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
9) pengamatan, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa;
10) pemantauan dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
11) pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
12) monitoring dan evaluasi dalam rangka surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan surveilans dan imunisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi;
3) pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan pengamatan penyakit, kesehatan haji dan bencana;
4) pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan imunisasi;

5) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan imunisasi, pengamatan penyakit dan pengendalian penyakit;
6) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit untuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB maupun peristiwa yang bersifat masal;
7) pengumpulan dan penyusunan bahan sebagai upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dengan memberikan kekebalan melalui imunisasi kepada bayi, balita, anak sekolah maupun orang dewasa;
8) pengumpulan dan penyusunan bahan guna pengamanan dan peningkatan kesehatan haji melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan serta imunisasi;
9) pengumpulan dan penyusunan bahan guna rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
10) pengumpulan dan penyusunan bahan pemantauan dan pengendalian terhadap penderita yang diduga berpenyakit menular yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi serta pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap penderita yang diduga berpenyakit tidak menular;
11) pengumpulan dan penyusunan bahan pemantauan dan pengendalian terhadap terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
12) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dengan KOMDA KIPI terhadap penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
13) pengumpulan dan penyusunan bahan pengamatan penyakit yang kemungkinan akan timbul dan pencegahannya (kewaspadaan dini) melalui penyuluhan dan pemeriksaan;
14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
3) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
4) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan

pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit yang bersumber dari binatang;

5) pengumpulan dan penyusunan bahan sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan guna upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang melalui penyuluhan dan pemeriksaan;
7) pengumpulan dan penyusunan bahan pengendalian vektor pada penyakit yang bersumber binatang agar tidak terjadi penyebaran kasus;
8) pengumpulan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi serta pembinaan teknis dan program untuk meningkatkan cakupan dan mutu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
9) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dan penyebarluasan informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit yang bersumber dari binatang;
10) pengumpulan dan penyusunan bahan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
11) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi lain yang terkait bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
3) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
4) penyiapan bahan bahan guna penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;
5) penyiapan bahan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan pengamatan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;

7) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan masalah kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan;
8) pengumpulan dan penyusunan bahan bimbingan dan penyuluhan tentang masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
9) pengumpulan dan penyusunan bahan memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dan penyebarluasan informasi terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;
10) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dan penyebarluasan informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;
11) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi lain yang terkait bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;
12) pengumpulan dan penyusunan bahan kerjasama pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan indra dan fungsional;
13) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan peningkatan kesehatan keluarga dan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat dan kegiatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan program Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya kesehatan;
3) pelaksanaan surveilans dan pelacakan KLB masalah kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
4) penanggulangan dan pencegahan terhadap masalah kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
5) pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat;
6) pelaksanaan evaluasi program kesehatan keluarga dan lingkungan, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat serta perbaikan gizi masyarakat;
7) pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Kesehatan Masyarakat; dan

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan keluarga, perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan keluarga, perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
3) pengumpulan dan penyusunan bahan guna upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;
4) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kepada seluruh UPT serta melaksanakan koordinasi dengan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah bersalin serta instansi terkait terhadap kegiatan penanggulangan masalah gizi dan upaya perbaikan gizi masyarakat;
5) penyiapan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan dalam penanggulangan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;
6) penyiapan bahan pelacakan, survailans dan penanggulangan KLB masalah kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
7) penyiapan bahan penanggulangan masalah gizi dalam keadaan normal dan keadaan darurat;
8) penyiapan bahan pelatihan dan penyuluhan gizi;
9) penyiapan bahan pengawasan mutu gizi dan kesehatan makanan;
10) penyiapan bahan pemantapan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
11) pengumpulan dan penyusunan bahan sebagai bahan upaya perbaikan gizi makro dan mikro pada masyarakat;
12) pengumpulan dan penyusunan bahan sebagai bahan upaya perbaikan gizi klinik di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
13) pengumpulan dan penyusunan bahan sebagai bahan upaya perbaikan gizi institusi pada institusi penyelenggaraan makanan;
14) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan penggerakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan keluarga dan gizi pada upaya kesehatan bersumber daya masyarakat serta organisasi profesi terkait;
15) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan penelitian, pengembangan gizi dan penerapan hasil penelitian kesehatan keluarga dan gizi;
16) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;

17) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ; dan
19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
2) penyiapan bahan pengumpulan dan penyusunan bahan guna pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan masyarakat;
3) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dengan organisasi profesi/sekolah kesehatan dan non kesehatan/tokoh masyarakat dan Perangkat Daerah yang terkait terhadap kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4) pengumpulan dan penyusunan bahan guna identifikasi permasalahan dan hambatan dalam penanggulangan upaya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
5) pengumpulan dan pengolahan data guna analisis/pengkajian perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga/sekolah/tempat ibadah/perkantoran serta tempat-tempat umum;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren), Kelurahan Siaga, Saka Bakti Husada (SBH), dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
7) pengumpulan dan penyusunan bahan koordiansi dengan Organisasi Profesi/Sekolah Kesehatan dan Non Kesehatan/Tokoh Masyarakat dan Perangkat Daerah yang terkait terhadap kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Pondok Pesanten (Poskestren), Kelurahan Siaga, Saka Bakti Husada (SBH), dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
8) pengumpulan dan penyusunan bahan guna identifikasi permasalahan dan hambatan dalam menanggulangi upaya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Kelurahan Siaga, Saka Bakti Husada (SBH), dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
9) pengumpulan dan penyusunan bahan guna pengelolaan dan fasilitasi jaminan kesehatan sesuai kondisi kota;
10) pengumpulan dan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
11) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas:

1) merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2) memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
3) memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bina kesehatan kerja dan olahraga;
4) memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
5) mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi;
6) membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
7) memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
8) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
9) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
10) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan program Bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang Bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;

3) pengawasan dan pengendalian keamanan sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetik, makanan dan minuman yang beredar;
4) pemrosesan pertimbangan teknis dan/atau pemberian izin operasional toko alat kesehatan dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
5) penyiapan bahan pendayagunaan tenaga kesehatan;
6) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan;
7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan Kefarmasian .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kefarmasian;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kebijakan teknis bidang kefarmasian;
3) pengumpulan dan penyusunan bahan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan obat;
4) pengumpulan dan penyusunan bahan guna pengadaan kebutuhan obat di sarana pelayanan kesehatan;
5) pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat;
6) dalam rangka penyimpanan dan pendistribusian obat ke unit pelayanan kesehatan;
7) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi;
8) pengumpulan dan penyusunan bahan pemberian rekomendasi dan/atau pemberian izin apotek, pedagang eceran obat, salon, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
9) pengumpulan dan penyusunan bahan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar;
10) pengumpulan dan penyusunan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana pada Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman;
11) pengumpulan dan penyusunan bahan sertifikasi dan pemberian sertifikat produksi pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan;
12) pengambilan dan pengujian sampel makanan dan minuman yang beredar di masyarakat;
13) pengumpulan dan penyusunan bahan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat, produsen industri rumah tangga pangan, karyawan industri rumah tangga pangan, distributor/toko pangan dan rumah makan;
14) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang kefarmasian;

15) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
16) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kefarmasian; dan
17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian peredaran alat kesehatan, perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian peredaran alat kesehatan, perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3) pengumpulan dan penyusunan bahan pengadaan kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
4) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran alat kesehatan, perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
5) penyiapan bahan pemrosesan sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan pertimbangan teknis izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
7) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang peredaran, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
8) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
2) penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;

3) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan tenaga pengelola kesehatan serta penyusunan bahan pertimbangan pemberian sertifikasi;
4) pengumpulan dan penyusunan bahan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan;
5) pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan;
6) pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang registrasi, perizinan, akreditasi tenaga kesehatan;
7) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Manusia; dan
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

b. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Subbagian Perencanaan;
   2. Subbagian Keuangan;
   3. Subbagian Umum dan kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
   1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
   2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
   3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
   1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
   2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
   1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
   2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
   3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
f. Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdiri dari :
   1. Seksi SDM Kesehatan;
   2. Seksi Kefarmasian; dan
   3. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
g. UPT Fungsional Rumah Sakit;

h. UPT Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat;
i. UPT; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebanyak : 18 buah, dengan rincian sebagai berikut :

1). Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungkandang;
2). Pusat Kesehatan Masyarakat Gribig;
3). Pusat Kesehatan Masyarakat Arjowinangun;
4). Pusat Kesehatan Masyarakat Janti;
5). Pusat Kesehatan Masyarakat Ciptomulyo;
6). Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyorejo;
7). Pusat Kesehatan Masyarakat Arjuno;
8). Pusat Kesehatan Masyarakat Bareng;
9). Pusat Kesehatan Masyarakat Rampal Celaket;
10). Pusat Kesehatan Masyarakat Cisadea;
11). Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalkerep;
12). Pusat Kesehatan Masyarakat Pandanwangi;
13). Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo;
14). Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolangu;
15). Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalsari;
16). Pusat Kesehatan Masyarakat Polowijen;
17). Rumah Sakit Umum Daerah
18). UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Berdasarkan data yang terhimpun di Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang, selama tahun 2017 - 2018 telah tercatat jenis dan jumlah tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel : 2.2.1. Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan Jenis jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Dinas Kesehatan Tahun 2017 - 2018

NO	JABATAN	JUMLAH	
		2017	2018
1	2	3	4
I	Tenaga Kesehatan	564	547
	Dokter Spesialis	3	4
	Dokter Umum	57	55
	Dokter Gigi	36	35
	Apoteker	8	8
	Asisten Apoteker	29	29
	Administrator Kesehatan Pertama	7	8
	Bidan	147	138
	Perawat	158	153
	Perawat Gigi	25	24
	Nutrisionis	32	30
	Penyuluh Kesehatan	3	3
	Pranata Laboratorium	29	29
	Sanitarian	19	19
	Radiologi	5	5

NO	JABATAN	JUMLAH	
		2017	2018
1	2	3	4
	Tehnik elektro Medik	2	2
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1	1
	Okupasi	1	1
	Psikologi Klinis	1	1
	Terapi Wicara	1	2
II	Tenaga Non Kesehatan	127	126
	(Jabatan Fungsional Umum / Pengadministrasi/ Pengelola/ Pengolah/ Petugas Keamanan/ Kebersihan/ Pengemudi)	127	126
III	Pejabat Struktural	46	37
	Eselon II	1	1
	Eselon III.a	1	1
	Eselon III.b	4	3
	Eselon IV.a.	21	19
	Eselon IV.b	19	13
	JUMLAH	737	710

Tabel : 2.2.2. Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun 2017 - 2018

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH			
		2017		2018	
		L	P	L	P
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	9	1	8
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	5	1	5
3	Pembina, (IV/a)	12	34	12	36
4	Penata TK I (III/d)	28	95	28	95
5	Penata (III/c)	19	58	19	69
6	Penata Muda T.K I (III/b)	31	101	31	110
7	Penata Muda (III/a)	19	129	18	108
8	Pengatur Tk. I (II/d)	13	43	13	33
9	Pengatur (II/c)	31	69	31	60
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3	2	3	0
11	Pengatur Muda (II/a)	6	5	6	3
12	Juru Tk.I (I/d)	0	1	8	1
13	Juru (I/c)	13	0	3	0
14	Juru Muda Tk. I (I-b)	1	0	6	0
15	Juru Muda (I/a)	8	0	2	0
	JUMLAH	186	551	182	528
		737		710	

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang, selain didukung dengan keberadaan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Malang juga memiliki beberapa sarana pelayanan kesehatan masyarakat, yang terdiri dari 6 UPT Puskesmas Perawatan, 10 UPT Puskesmas Non Perawatan, 33 Puskesmas Pembantu, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan gudang farmasi. Sarana penunjang kegiatan pelayanan lainnya adalah mobil puskesmas keliling/ ambulan yang berjumlah 41 mobil dan

kendaraan operasional yang berjumlah 92 sepeda motor dan Personal Computer (PC) sebanyak 478 buah, tersebar di kantor Dinas Kesehatan ataupun di UPT yang ada.

Pembangunan kesehatan di Kota Malang juga didukung oleh banyak pihak. Selain dibantu dengan keberadaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) seperti 16 puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan juga dibantu dengan keberadaan pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan pemerintah dan swasta yang ada dan tersebar di Kota Malang. Selain itu, peran serta masyarakat melalui kader kesehatan dan berbagai UKBM yang berkembang telah berperan menjadi penggerak pembangunan kesehatan.

Hingga tahun 2018, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3. Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang Tahun 2018

No	Pelayanan Kesehatan	Pemerintah	Swasta	Total
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit Umum	4	9	13
2	Rumah Sakit Khusus	0	12	12
3	Puskesmas Perawatan	6	-	6
4	Puskesmas Non Perawatan	10	-	10
5	Puskesmas Pembantu	33	-	33
6	Balai Pengobatan/ Klinik	3	76	79
7	Posyandu	-	652	652
8	Poskeskel	57	-	57
9	Apotek	15	163	178

Dibandingkan dengan periode tahun 2017, pada tahun 2018 terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk pembiayaan bidang kesehatan, meskipun mengalami penurunan secara persentase dibanding tahun 2017 dan belum mencapai 10% dari Total APBD Kota Malang. Sedangkan anggaran kesehatan perkapita penduduk Kota Malang mengalami peningkatan pada tahun 2018, dibandingkan tahun 2017 maupun 2016, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.2.4. Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016-2018

NO	JENIS SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH ALOKASI		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	APBD Kota Malang (DAU, DAK, DBHCHT, Bantuan Keuangan Prov Jatim), terdiri dari :	133.003.850.070,26	193.215.817.956,15	219.720.275.624,36
	Belanja Langsung	85.747.504.184,71	137.620.691.696,15	156.664.287.673,63
	Belanja Tidak Langsung	47,256,345,885.55	55.595.126.260,00	63.055.987.950,73

NO	JENIS SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH ALOKASI		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2.	APBD Provinsi/ Dekonsentrasi	26.740.000,00	0	0
3.	APBN / TP	0	0	0
Total alokasi pembiayaan kesehatan		133.030.590.070,26	193.215.817.956 ,15	219,720,275,624.36
Total APBD Kota Malang		1.974.487.562.026,95	1.741.185.350.079,88	2,360,831,551,277.66
% Pembiayaan Kesehatan Thd APBD Kota Malang		6,73%	11,10%	9.31 %
% Pembiayaan Kesehatan Thd APBD Kota Malang (Non Gaji)		4,34%	7,90%	15.43 %
Anggaran Kesehatan perkapita		155.335,16	159.761,38	253.684,00

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dapat dilihat dari pelaksanaan indikator wajib yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan atau yang telah dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dalam beberapa tahun.

Pada pasal 1 (satu), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dan jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan yang dimaksud dengan Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pada tabel 2.3.1. berikut ini terlihat adanya capaian kinerja yang sudah mencapai target akhir periode renstra (tahun 2018) sebanyak 14 indikator. Sedangkan target IKU yang tidak tercapai pada akhir periode renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 ada 2 indikator, yaitu :

(1) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) dengan penurunan sebesar 0,15

(2) Persentase desa/ kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* dengan penurunan sebesar 8,78%.

Tabel 2.3.1. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018 dengan target akhir periode Renstra Dinas Kesehatan (Tahun 2018)

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian			
		Uraian		Target 2018	Realisasi 2018	Target akhir periode Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3		4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu	1	Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,06	0,08	0,06	+0,02
		2	Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,43	0,34	0,43	-0.09
		3	Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	11	16	11	+5
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu	4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar	50%	68%	100%	-32%
3	Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit	5	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	94%	106,25%	100%	+6,25%
		6	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97 %	94,64 %	91%	+3,64
		7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %	98,88 %	85%	+13,88
		8	Persentase balita gizi buruk	< 0,45 %	0,06 %	<0,45%	+0,39%
4	Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit	9	Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh	100 %	98,8 %	100%	-1,2%
		10	Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani	100 %	97,44 %	100%	-2,56%
		11	Persentase desa / kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	91%	73,68 %	100%	-26,32%
		12	Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	0
5	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan	13	Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat	92%	87,4%	91%	-3,6%
		14	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 101	1 : 91,59	1 : 101	0
		15	Persentase kelurahan siaga aktif	100%	100%	100%	0
		16	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan	78 %	100 %	78%	+22%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian			
		Uraian	Target 2018	Realisasi 2018	Target akhir periode Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
		pelayanan kesehatan dasar				

Sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Kesehatan pada Tahun 2018, terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai yaitu :

(1) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)
(2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar
(3) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh
(4) Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani
(5) Persentase desa / kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*
(6) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

Dari capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yang realisasi capaiannya masih "rendah" sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Kesehatan yaitu :

(1) Persentase desa / kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* dengan selisih capaian -26,32%
(2) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat dengan selisih capaian -32%

Target dan realisasi capaian kinerja SPM Dinas Kesehatan pada periode tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan tahun 2017 dan 2018

NO	URAIAN		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	11.975	89,98	12.492	94,57
		Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.308		13.209	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	11.636	91,60	11.932	94,64
		Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	12.703		12.608	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	11.698	96,69	11.799	98,26

NO	URAIAN		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
		Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	12.098		12.008	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	47.084	78,03	50.126	83,81
		Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	60.343		59.808	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	30.178	99,96	31.551	99,85
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	30.189		31.598	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	301.845	50,45	373.065	61,79
		Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	598.351			
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	40.971	53,63	41.309	48,09
		Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	76.392		85.904	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	59.283	33,15	41.591	22,76
		umlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	178.808		182.762	

NO	URAIAN		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	22.206	47,70	21.578	36,17
		Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	46.558		59.654	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	480	100,00	688	100,00
		Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	480		688	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.815	100,00	1.835	100,00
		Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	1.815		1.835	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	7.452	67,17	10.667	48,00
		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	11.095		22.223	

Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, hanya 2 indikator SPM dari 12 indikator SPM, yang mencapai target 100%. Indikator SPM, yang terealisasi 100% tersebut, adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
2. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

Sepuluh indikator SPM Bidang Kesehatan lainnya masih belum mencapai target, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan pencapaian target indiktor SPM dengan pencapaian target di bawah 50% pada tahun 2018, sebanyak 4 indikator SPM, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (48,09%)
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (22,76%)
3. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) (36,17%)
4. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (48%)

Sehingga perlu untuk diupayakan pencapaian pada periode kepemimpinan Kepala Daerah atau pemerintah 2018- 2023, mendatang dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Malang, sebagaimana Visi dan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota periode 2018 - 2023

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Malang, selama periode 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	NA	NA	NA	NA	23	23	23	23	23	14,39	8,62	6,86	5,12	6,71	137,4%	162,5%	170,2%	177,7%	170,8%
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	NA	NA	NA	NA	977	977	977	977	977	984,32	990,1	990,46	993,72	993,29	101%	101%	101%	102%	102%
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	NA	NA	NA	NA	32	32	32	32	32	16,81	10,66	10,62	6,78	6,88	155,0%	166,7%	166,8%	178,8%	178,5%
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	NA	NA	NA	NA	23	23	12	12	12	14,39	8,61	6,86	5,41	6,67	137,4%	162,6%	170,2%	176,5%	171,0%
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	NA	NA	NA	NA	102	102	70	70	70	97,97	68,24	75,29	115,72	83,89	104,0%	133,1%	92,4%	34,7%	80,2%
6	Rasio posyandu per satuan balita	NA	NA	NA	NA	1:103	1:103	1:102	1:102	1:101	1:103	1:94	1:98,71	1 : 93	1 : 91,59	100%	108,74 %	103,23 %	108,82 %	109,32%
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	NA	NA	NA	NA	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,117	0,17	0,14	0,14	0,14	100%	58,33%	58,33%	83,33%	83,33%
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	NA	NA	NA	NA	0,28	0,29	0,3	0,3	0,3	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	100%	108,74 %	103,23 %	108,82 %	109,32%
9	Rasio dokter per satuan penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,001	0,001	0,0012	0,001	0,002	NA	NA	NA	NA	NA
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	NA	NA	NA	NA	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,23	1,57	1,36	1,38	0,08	100%	108,74 %	103,23 %	108,82 %	109,32%
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	NA	NA	NA	90	91	92	93	94	87,75	82,89	84,36	93,18	106,25	98%	91%	92%	100%	113%
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	NA	NA	NA	93	94	95	96	97	91,59	90,73	93,58	91,65	38,89	98%	97%	99%	95%	40%
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	NA	NA	NA	90	90	90	91	91	82,46	66,67	71,93	82,46	52,63	92%	74%	80%	91%	58%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal / kapita/ hari)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	NA	NA	NA	95	95	95	95	95	98,9	89,7	95,9	97,4	92,72	104%	94%	101%	103%	98%
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	NA	NA	NA	4	4	4	4	4	6	0	1	2	1,69	150%	0%	14%	50%	42%
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	NA	NA	NA	69	70	72	75	80	59,2	54,2	62,1	64,7	87,52	86%	77%	86%	86%	109%

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	BTA																			
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	169	160	217	207	212	NA	NA	NA	NA	NA
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,67	1,88	1,4	2,55	2,19	NA	NA	NA	NA	NA
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6,79	6,5	6,9	7,34	9,38	NA	NA	NA	NA	NA
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,92	66,85	67	67	62	NA	NA	NA	NA	NA
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	99,37	98,99	99,35	97,14	98,63	99%	99%	99%	97%	99%
25	Penderita diare yang ditangani	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
26	Angka kejadian Malaria		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0,001	0,002	0,002					
27	Tingkat kematian akibat malaria		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,082	0,067	0,060	0,088	0,116	NA	NA	NA	NA	NA
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yg memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	NA	NA	NA	45%	40%	30%	25%	15%	39,36	45,87	6,33	100	1	8747%	11468%	2110%	40000%	667%
34	Cakupan kunjungan bayi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,83	78,98	87,53	92,3	100	NA	NA	NA	NA	NA
35	Cakupan puskesmas	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3,2	3,2	NA	NA	NA	NA	NA
36	Cakupan pembantu puskesmas	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	NA	NA	NA	NA	NA
37	Cakupan kunjungan bayi Ibu Hamil K4	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88,52	87,67	88,59	89,98	94,57	NA	NA	NA	NA	NA
38	Cakupan pelayanan nifas	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	91,5	85,61	91,18	90,39	92,56	NA	NA	NA	NA	NA
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76,55	71,69	73,99	74,65	100	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40	Cakupan pelayanan anak balita	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80,7	63,06	68,1	74,3	81,92	NA	NA	NA	NA	NA
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99,93	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	NA	NA	NA	99,44	99,5	99,65	99,7	99,75	100	100	97,62	99,98	99,88	101%	101%	98%	100%	100%
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	NA	NA	NA	74	75	76	77	78	76,03	77,92	77,96	100	100	103%	104%	103%	130%	128%
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
46	Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
47	Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
48	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	88,52	87,67	88,59	89,98	94,57	88,52	87,67	88,59	89,98	94,57
49	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	91,59	90,73	93,58	91,65	94,64	91,59	90,73	93,58	91,65	94,64
50	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	98,49	78,98	87,53	92,03	90,97	98,49	78,98	87,53	92,03	90,97
51	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	80,77	63,06	68,1	74,33	81,92	80,77	63,06	68,10	74,33	81,92
52	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	NA	NA	NA	99,94	99,88	NA	NA	NA	99,94	99,88
53	Persentase penduduk pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	50,45	61,79	NA	NA	NA	NA	NA
54	Persentase penduduk pada usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	25,79	75,3	19,51	53,63	48,09	NA	NA	NA	53,63	48,09

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
55	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	35,92	30,04	34,41	33,15	22,76	NA	NA	NA	33,15	22,76
56	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	47,7	36,17	NA	NA	NA	NA	NA
57	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	NA	NA
58	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	11,36	16,2	14,78	100	100	NA	NA	NA	100	100
59	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	67,17	48	NA	NA	NA	NA	NA

Dari 59 indikator pada tabel tersebut diatas 47 indikator kinerja yang ada pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 indikator SPM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

Sebanyak 12 indikator SPM tersebut terdapat 3 indikator SPM, yang memenuhi atau tercapai sesuai target (100%) pada periode tahun 2018, yaitu :

1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (99,96%)
2. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%)
3. Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%)

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja SPM pelayanan kesehatan tersebut (100%) antara lain, basis data sasaran pelayanan yang valid. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan pelayanan kesehatan tersebut sudah dilaksanakan secara rutin sejak bertahun tahun sebelumnya. Disamping terjalin hubungan dan kordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan selaku pengampu anak usia pendidikan dasar (SD) yang ada di semua wilayah kerja puskesmas.

Sedangkan indikator SPM yang pencapaian kinerjanya dibawah 50% pada tahun 2018, ada 4 indikator yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (48,09%)
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (22,76%)
3. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) (36,17%)
4. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (48%)

Rendahnya capaian kinerja SPM tersebut, antara lain karena pendataan atau ketersediaan data penderita penyakit tersebut (hipertensi, diabetes mellitus dan HIV/AIDS) yang masih belum valid. Sehingga salah satu upaya yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah melakukan pendataan dengan baik dan benar sehingga dalam menyusun perencanaan intervensi/ kegiatan akan menjadi lebih baik. Disamping itu juga disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat pada umumnya tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus.

Tingkat capaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), pada tahun 2017 juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebabnya dari sisi masyarakat oleh karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan keluarga penderita TBC tentang bahaya penyakit tersebut, banyak penderita dan keluarganya yang tidak menyadari saat menderita penyakit tersebut. Selain itu, juga karena keterbatasan jumlah petugas kesehatan di puskesmas, sehingga tidak bisa secara maksimal menemukan kasus penyakit TBC di masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang rendah capaian kinerjanya pada setiap tahun, oleh karena memang sedikit masyarakat miskin yang memanfaatkan rumah sakit (pelayanan rujukan). Kondisi seperti ini juga terjadi layanan dasar masyarakat miskin, yang juga rendah. Meskipun demikian sebagian besar masyarakat miskin Kota Malang sudah mendapatkan atau memiliki jaminan kesehatan sebagai peserta JKN, baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN maupun PBI-APBD.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Malang

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Pendapatan	7,496,084,000	16,238,576,000	13,000,000,000	19,534,918,550	1,250,000,000	13,216,475,000	17,674,167,943	19,808,264,550	19,021,413,450	20,224,427,250	176	109	152	97	1,62	11,503,915,710	17,988,949,639
1	Retribusi Daerah	605,000,000	605,000,000	1,000,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	6,609,953,000	887,318,000	1,523,346,000	1,680,742,000	1,804,875,000	1,09	147	152	134	144	942,000,000	2,501,246,800
2	Lain lain PAD yang sah (Kapitasi JKN)	6,891,084,000	15,633,576,000	12,000,000,000	18,284,918,550	NA	6,606,522,000	16,786,849,943	18,284,918,550	17,340,671,450	18,419,552,250	96	107	152	95	NA	NA	15,487,702,839
II	Belanja	92,140,641,000	85,624,459,131	85,747,504,185	37,620,691,696	156,664,287,674	43,967,562,190	66,445,268,325	71,936,314,495	109,731,582,258	13,868,147,085	48	78	84	80	73	111,559,516,737	81,189,774,871
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,964,646,210	23,880,591,831	26,780,964,982	3,914,314,500	1,048,849,500	9,334,406,528	17,842,913,069	23,344,039,878	2,752,875,485	856,652,850	72	75	87	70	82	13,717,873,405	10,826,177,562
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,177,597,500	22,369,882,380	16,655,141,000	10,545,235,000	4,175,305,500	826,198,895	18,920,032,344	13,375,350,458	9,303,977,846	3,136,328,772	38	85	80	88	75	11,184,632,276	9,112,377,663
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78,233,500	135,000,000	204,786,000	733,000,000	125,000,000	59,844,925	126,131,500	153,016,000	314,712,486	121,465,000	76	93	75	43	97	255,203,900	155,033,982
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	18,585,400	505,114,000	321,155,000	392,215,000	541,330,000	17,901,200	284,991,500	297,465,770	313,242,600	400,200,000	96	56	93	80	74	355,679,880	262,760,214
5	Program Pengawasan Obat dan Makanan	316,669,400	435,000,000	562,000,000	546,000,000	524,700,000	289,024,450	390,361,240	459,885,809	314,405,900	342,865,530	91	90	82	58	65	476,873,880	359,308,586
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	299,811,000	857,750,000	933,000,000	20,684,590,000	37,916,639,381	276,411,000	787,867,300	824,091,500	16,482,468,192	19,548,873,777	92	92	88	80	52	12,138,358,076	7,583,942,354
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6,402,000,000	13,668,100,000	11,239,000,000	16,873,500,000	13,223,006,150	6,360,819,718	13,268,268,085	9,525,774,770	16,275,334,419	9,428,212,881	99	97	85	96	71	12,281,121,230	10,971,681,975
8	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	23,766,003,120	18,164,577,900	20,098,192,103	35,132,443,780	33,084,952,161	18,692,166,245	10,867,757,767	18,169,992,920	28,215,860,021	28,492,596,613	79	60	90	80	86	26,049,233,813	20,887,674,713
9	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	NA	NA	NA	228,900,000	507,111,800	NA	NA	NA	217,938,664	479,488,480	NA	NA	NA	95	95	147,202,360	139,485,429
10	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	NA	NA	NA	155,400,000	136,392,000	NA	NA	NA	152,880,900	111,732,000	NA	NA	NA	98	82	58,358,400	52,922,580
11	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,022,608,350	1,859,052,000	3,342,657,100	2,287,209,000	3,470,860,000	872,869,000	1,461,948,634	2,839,312,960	1,939,522,850	2,720,309,924	85	79	85	85	78	2,396,477,290	1,966,792,674

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	NA	NA	NA	580,665,500	1,279,365,500	NA	NA	NA	534,252,658	1,094,592,938	NA	NA	NA	92	86	372,006,200	325,769,119
13	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	308,988,900	573,400,000	702,661,900	1,382,641,100	1,584,766,600	285,908,000	476,502,856	626,616,384	1,157,421,134	1,178,865,677	93	83	89	84	74	910,491,700	745,062,810
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	211,213,800	280,000,000	480,000,000	7,434,590,000	12,434,170,000	209,508,200	276,380,400	438,204,500	6,789,996,850	11,077,962,297	99	99	91	91	89	4,167,994,760	3,758,410,449
15	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	NA	NA	NA	247,700,000	589,500,000	NA	NA	NA	164,500,000	27,026,000	NA	NA	NA	66	5	167,440,000	38,305,200
16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan	3,098,874,600	2,895,991,020	4,427,946,100	13,071,746,816	15,534,279,082	2,198,138,309	1,742,113,630	1,882,563,547	8,564,223,637	11,076,935,982	71	60	43	66	71	7,805,767,524	5,092,795,021
17	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	41,475,409,220	NA	NA	23,410,541,000	30,488,060,000	4,544,365,720	NA	NA	16,237,968,616	23,774,038,364	11	NA	NA	69	78	19,074,802,044	8,911,274,540

Pada tabel 2.2. tersebut diatas, terlihat bahwa rata-rata anggaran belanja langsung atau program selama periode 5 tahun (2014-2018) pada Dinas Kesehatan Kota Malang sebesar Rp. 111.559.516.737 per tahun. Sedangkan rata rata pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung atau belanja program adalah Rp. 44.623.806.694 per tahun.

Lima program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran setiap tahunnya selama periode 2014 – 2018 teratas, adalah sbb :

1. Program pelayanan kesehatan dasar, sebesar Rp. 26.049.233.813
2. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, sebesar Rp. 19.074.802.044
3. Program pelayanan administrasi perkantoran, sebesar Rp. 13.717.873.405
4. Program perbaikan gizi masyarakat, sebesar Rp. 12.281.121.230
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 12.138.358.076

Tingginya rata rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang selama 2014 – 2018, tidak semuanya linier atau seiring dengan rata rata realisasi anggaran pada setiap program tersebut. 5 (lima) program dengan rata rata pertumbuhan realisasi anggaran per program sebagai berikut :

1. Program pelayanan kesehatan dasar, sebesar Rp. 20.887.674.713
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, sebesar Rp. 10.971.681.975
3. Program pelayanan administrasi perkantoran, sebesar Rp. 10.826.177.562
4. Program peningkatan sarana prasarana aparatur , sebesar Rp. 9.112.377.663
5. Program pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, sebesar Rp. 8.911.274.540

Selama periode tahun 2014–2016, program pelayanan kesehatan tradisional dan program pelayanan kesehatan rujukan merupakan bagian atau menjadi kegiatan dari program pelayanan kesehatan dasar. Besarnya anggaran untuk program pelayanan kesehatan dasar, oleh karena sebagian besar di alokasikan untuk kegiatan operasional 16 puskesmas di Kota Malang, terdiri dari 10 Puskesmas Non Rawat Inap dan 6 Puskesmas Rawat Inap, baik bersumber Kapitasi JKN, maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Sedangkan besarnya rata-rata pertumbuhan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran di karenakan pada periode 2014-2016, sebelum adanya struktur organisasi yang baru, anggaran untuk operasional UPT Dinas Kesehatan, termasuk puskesmas dimasukkan pada anggaran program pelayanan administrasi perkantoran.

Anggaran untuk program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang besar digunakan untuk pembayaran premi kepesertaan JKN- BPJS (PBI – APBD) atau jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Malang dan membayar klaim tagihan rumah sakit yang telah melayani masyarakat miskin Kota Malang yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (PBI-APBD).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengembangan pelayanan sampai dengan 5 tahun ke depan, antara lain :

1. Misi pembangunan Nasional bidang kesehatan, yaitu "Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera" dan Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan arah kebijakan :
   a. Penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*) di Puskesmas
   b. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (*continuum of care*)
   c. Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*)
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, mengamanatkan puskesmas yang ada harus terakreditasi dengan masa berlaku setiap 3 (tiga) tahun.
   a. 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang, semuanya telah terakreditasi. Akan tetapi masa berlakunya status terakreditasi hanya selama 3 tahun dan harus menjalani re akreditasi atau penilaian lagi setiap 3 tahun sekali, yaitu :
      (1). Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) puskesmas yang harus melaksanakan re-akreditasi, oleh karena telah habis jangka waktu akreditasinya, yaitu Puskesmas Puskesmas Bareng, Puskesmas Janti, Puskesmas Dinoyo dan Puskesmas Pandanwangi.
      (2). Pada tahun 2020, terdapat 11 (sebelas) puskesmas yang harus melaksanakan re-akreditasi, oleh karena telah habis jangka waktu akreditasinya, yaitu Puskesmas Arjuno, Puskesmas Mulyorejo, Puskesmas Kendalsari, Puskesmas Mojolangu, Puskesmas Rampal Celaket, Puskesmas Kendalkerep, Puskesmas Ciptomulyo, Puskesmas Kedungkandang, Puskesmas Gribig, Puskesmas Arjowinangun dan Puskesmas Cisadea.
      (3). Pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) puskesmas yang harus melaksanakan re-akreditasi, oleh karena telah habis jangka waktu akreditasinya, yaitu Puskesmas Polowijen.
3. Dari 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang, baru 2 puskesmas (Pukesmas Dinoyo dan Puskesmas Janti) yang telah ditetapkan sebagai Puskesmas yang menerapkan dan melaksanakan PPK-BLUD.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, sudah mulai operasional memberikan pelayanan kepada masyarakat dan telah terakreditasi, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Diharapkan ke depan segala kelemahan / kekurangan yang ada pada RSUD Kota Malang dapat segera teratasi, baik dari SDM maupun sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Kota Malang.
5. Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (pasal 18 ayat 23), Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, mengharuskan pemerintah daerah untuk

melaksanakan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 4 mewajibkan pemerintah daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah atau RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Keterbatasan tenaga baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, belum sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan. Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas kesehatan, mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi tidak optimal dan sangat kurang serta mempengaruhi tingkat capaian indikator kinerja.
8. Masih terdapat banyak data dan informasi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, yang tidak tersedia atau belum dilaksanakan. Juga masih terdapat beberapa capaian indikator SDGs yang belum sesuai harapan/standar.
9. Di era kewajiban akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan, masih ada puskesmas di Kota Malang yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat terkait lokasi dan bangunannya.
10. Masalah kesehatan *triple burden*, yaitu masih tingginya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali.
11. Di era jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastropik, yaitu PJK, Gagal Ginjal Kronik, Kanker, dan Stroke. Terlebih, pelayanan kesehatan peserta JKN masih didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan dibandingkan di tingkat dasar.

2.4.2. Peluang

1. Misi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kota terpilih periode 2019-2023 dan tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yang mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Malang, yaitu “Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga”, dengan tujuan “Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan,

Kesehatan dan Layanan Dasar lainnya" dan salah satu sasarannya " Meningkatnya kualitas layanan kesehatan"

2. Kewenangan urusan konkuren di Bidang Kesehatan daerah kabupaten/ Kota sebagaimana amanat Undang undang Nomor 23 Tahun :
   a. Upaya Kesehatan dengan kewenangan, yaitu :
      1) Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota
      2) Pengelolaan UKM Daerah kabupaten /kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten /kota
      3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota
   b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan kewenangan, yaitu:
      1) Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
      2) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota
   c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, yaitu:
      1) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
      2) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
      3) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
      4) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
      5) Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.
   d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yaitu :
      1) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/ kota.
3. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang memadai, sebagaimana amanat Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 : ayat (2) : Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
4. Masih adanya alokasi anggaran DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Kota Malang meskipun dengan jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya, untuk memperkuat dukungan anggaran pada kegiatan Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan terutama di Puskesmas.
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, telah mengatur pengembangan kawasan budidaya Kota Malang untuk pengembangan Zona pelayanan umum, melalui tahapan pelaksanaan pembangunan dengan indikasi program utama upaya pengembangan sarana kesehatan melalui kegiatan disetiap bagian wilayah perkotaan (BWP) yang meliputi :
   a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki
   b. Mengembangkan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/MDG's/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren). Permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/MDG's/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren).

Secara umum, ada 3 (tiga) hal besar yang menjadi masalah bidang kesehatan di Indonesia, yaitu :

1. Masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai. Karena dari sekitar 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besarnya masih berpusat di kota-kota besar. Masih banyak masyarakat di daerah yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena tidak adanya fasilitas kesehatan yang disediakan.
2. Masalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama untuk dokter spesialis dan bidan di desa.
3. Masalah pendanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.

Dari ketiga masalah bidang kesehatan tersebut, masalah yang dihadapi Kota Malang, lebih khusus lagi Dinas Kesehatan pada saat ini adalah kekurangan dan/ atau distribusi tenaga kesehatan yang kurang memadai/ tidak sesuai dengan kebutuhan baik di Dinas Kesehatan, maupun di UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD Kota Malang)

Beberapa kondisi yang masih menjadi masalahan bidang kesehatan di Kota Malang disamping sarana / prasarana dan tenaga yang sampai saat ini masih perlu mandapat perhatian dan terkait dengan tugas pokok fungsi, antara lain :

1. Status derajat kesehatan masyarakat kota yang belum optimal :
   a) Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kota Malang masih terjadi, meskipun dibawah angka provinsi Jawa Timur (terjadi penurunan dibanding tahun 2015)
   b) Masih terdapat kasus balita gizi buruk di Kota Malang
2. Masalah penyakit menular klasik, penyakit tidak menular, dan penyakit menular baru alias *new emergeing disease (triple burden)* :

a) Kelurahan dengan *Universal Child Immunization (UCI)* belum mencapai target (Kota Malang tahun 2018 ; 71,93%)
b) Angka kesakitan penyakit Tidak Menular (Jantung, Diabetes Melitus dan Hipertensi) masih cukup tinggi di Kota Malang
c) Angka kesakitan penyakit menular (HIV, tuberkulosis) masih cukup tinggi di Kota Malang
d) Kota Malang belum bebas pasung

3. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Malang masih belum optimal :
   a) Di era kewajiban akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan, masih ada puskesmas di Kota Malang yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat terkait lokasi dan bangunannya
   b) Masih terdapat masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan/PBI, sehingga tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu.
   c) Belum semua Puskesmas di Kota Malang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), hanya dua puskesmas yaitu Puskesmas Janti dan Puskesmas Dinoyo yg telah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD pada tahun 2019.
   d) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus selalu tersedia untuk pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
   e) Peningkatan pelayanan RSUD Kota Malang sesuai dengan standar mutu
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan perlu di pertahankan / ditingkatkan :
   a) Mempertahankan dan meningkatkan peran serta keterlibatan kader kesehatan di Posyandu.
   b) Meningkatan peran serta dan kerja sama dengan tokoh masyarakat serta kelompok/ lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 4 mewajibkan pemerintah daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan masih belum secara optimal melaksanakan ketentuan tersebut.

Salah satu arah kebijakan pengarusutamaan gender sampai dengan tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, salah satunya melalui peningkatan kualitas hidup perempuan yang secara umum dapat dilihat dari kesehatan ibu dengan melihat Angka Kematian Ibu (AKI). Disamping isu kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak juga

merupakan isu strategis pada perlindungan anak, khususnya di bidang kesehatan yang menjadi tupoksi Dinas Kesehatan.

Beberapa permasalahan yang ada di Kota Malang terkait dengan perlindungan anak ialah : masih adanya kematian bayi dan balita dengan angka yang cukup signifikan, anak penderita gizi buruk/ stunting, anak penderita HIV/AIDS, juga pengetahuan dan pemahaman remaja yang minim terhadap kesehatan reproduksi.

Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) harus segera di laksanakan pada UPT Dinas Kesehatan terutama Puskesmas dan RSUD Kota Malang.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah untuk unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dengan rencana ditetapkannya RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD, tentu output yang diharapkan yakni dapat meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme seluruh jajaran RSUD dan puskesmas dalam menyajikan pelayanan kesehatan. BLUD memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. RSUD dan puskesmas dapat merencanakan pendapatan dan pengeluaran secara efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 juga disebutkan beberapa ketentuan peralihan, sebagai berikut:

1. Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
2. Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, BLUD yang telah ditetapkan dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan.
3. Penyusunan dan penetapan RBA untuk anggaran tahun 2020 dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Secara ringkas, beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan kesehatan di Kota Malang, selama lima tahun ke depan (2018 – 2023) adalah sbb :

1. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal;
2. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
3. Belum optimalnya Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi;

4. Masih tingginya cakupan penemuan pasien baru TBC BTA Positif;
5. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular, terutama orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di fasilitas kesehatan;
6. Minimnya tenaga medis, terutama di tingkat puskesmas;
7. Puskesmas pembantu tidak beroperasi setiap hari;
8. Belum maksimalnya penanganan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga; dan
9. Pemberian jaminan kesehatan bagi semua warga.

Berikut ini permasalahan pembangunan di bidang kesehatan, penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Malang, sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6	7
1	Status derajat kesehatan masyarakat kota yang belum optimal	1. Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi di Kota Malang masih terjadi signifikan	➢ Pertolongan persalinan pada sebagian masyarakat tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan ➢ Keterlambatan dalam melakukan rujukan ibu bersalin, sehingga berakibat fatal pada ibu bersalin tsb	➢ Petugas kesehatan belum optimal dalam memberikan informasi tentang pemeriksaan kesehatan kehamilan kepada sebagian masyarakat ➢ Kurangnya media informasi ttg kesehatan kehamilan yang mudah di lihat/ diketahui oleh masyarakat ➢ Pendampingan oleh tenaga kesehatan pada kasus ibu hamil/ bersalin beresiko yang dirujuk belum optimal ➢ tenaga kesehatan yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan persalinan	➢ Pemahaman dan Kesadaran masyarakat untuk senantiasa memeriksakan kesehatan saat kehamilan dan persalinan pada sebagian masyarakat masih rendah ➢ Sebagian masyarakat Kota Malang masih memegang budaya daerah dan salah satunya adalah budaya melahirkan di dukun bayi ➢ pengaruh dan peran keluarga dalam pengambilan keputusan ttg persalinan	➢ Masih ada ibu hamil yang tidak rutin memeriksakan kehamilannya ke petugas/ fasilitas pelayanan kesehatan (tahun 2018 K1 : 100%, K4 : 94,57%) ➢ Budaya sebagian masyarakat yg lebih memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi ➢ Banyak penduduk KotaMalang (Ber KTP Kota Malang) yang sehari hari tinggal di wilayah luar Kota Malang, sehingga tidak terpantau saat ,mengalami masalah kesehatan pada saat kehamilan dan persalinan dan sebaliknya ➢ Pertimbangan biaya persalinan yg berpengruh dlm pengambilan keputusan ttg persalinan (faktor ketidakmampuan biaya persalinan) ➢ Keterampilan petugas kesehatan dalam penatalaksanaan kehamilan dan penatalaksanaan bayi belum optimal
		2. Masih terdapat kasus balita gizi buruk / *stunting* di Kota Malang;	➢ Kurangnya asupan zat gizi pada Bayi dan Balita yang membutuhkan kecukupan gizi	➢ Petugas kesehatan belum optimal dalam memberikan informasi tentang Gizi kepada sebagian masyarakat	➢ Pengetahuan keluarga / masyarakat yang kurang ttg pola makan yang benar ➢ Ketidakmampuan sebagian masyarakat	➢ Pola makan dan kebiasanaan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi ➢ Ketidakmampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi/ balita (miskin)

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6	7
				➢ Kurangnya media informasi ttg Gizi yang mudah di lihat/ diketahui oleh masyarakat	untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi/ balitanya (faktor kemiskinan)	
2	Masalah penyakit menular klasik, penyakit tidak menular, dan penyakit menular baru alias *new emergeing disease (triple burden)*	1. Masih meningkatnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang berpotensi menimbulkan wabah/KLB misalnya penyakit difteri dan campak	➢ Belum optimalnya Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	➢ Petugas kesehatan belum optimal dalam memberikan informasi dan kurangnya media informasi ttg penyakit PD3I dan imunisasi yang mudah di lihat/ diketahui oleh masyarakat ➢ Belum optimalnya sebagian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan imunisasi ➢ Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan imunisasi dalam buku kohort oleh petugas kesehatan	➢ kurangnya kesadaran sebagian masyarakat/ kelompok masyarakat akan pentingnya imunisasi;	➢ Adanya sebagian kelompok masyarakat yang mempermasalahkan “halal haram imunisasi”, terkait keyakinannya.
		2. Angka penemuan kasus*(Case Detection Rate /CDR)* TB masih rendah	➢ Penemuan terduga kasus TB masih rendah	➢ Pelaksanaan investigasi kontak erat TB oleh petugas kesehatan, masih rendah ➢ Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan penyisiran kasus TB	➢ Pemahaman dan Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan (batuk lebih dari 3 mgg) masih rendah ➢ Masih tingginya *Missing case* kasus TB di rumah sakit	➢ Masih ada stigma tentang kasus TB di masyarakat, (sebagai penyakit turunan, penyakit kutukan) ➢ Belum optimalnya Jejaring internal TB di rumah sakit

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6	7
				oleh petugas ➢ Petugas kesehatan belum optimal dalam memberikan informasi dan kurangnya media informasi ttg penyakit TB yang mudah di lihat/ diketahui oleh masyarakat		
		3. Meningkatnya kasus penyakit degenerative (penyakit tidak menular)	➢ Pelaksanaan kegiatan Skreening penduduk usia > 15 tahun masih belum optimal	➢ Keterbatasan jumlah SDM Kesehatan pelaksana *screening*	➢ Pemahaman dan Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara periodik masih rendah	➢ Keterbatasan jumlah petugas / SDM pengelola program
3	Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Malang masih belum optimal	1. Cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/ warga Kota Malang khususnya warga miskin belum merata	➢ Belum semua masyarakat/ warga Kota Malang, khususnya masyarakat miskin memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) atau Jaminan Kesehatan Lainnya	➢ Puskesmas pembantu tidak beroperasi setiap hari; ➢ Belum maksimalnya penanganan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga;	➢ Ketidakmampuan warga /masyarakat ➢ (miskin) untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) atau Jaminan Kesehatan lainnya ➢ Ketersediaan Data masyarakat/ warga Kota Malang yang belum terlindungi Jaminan Kesehatan masih rendah validitasnya	➢ Masih terdapat Masyarakat/ warga Kota Malang yg tidak terlindungi jaminan kesehatan ➢ Keterbatasan jumlah tenaga medis, terutama di tingkat puskesmas;

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Kualitas Pelayanan RSUD Kota Malang masih belum optimal	➢ Jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terbatas/ belum lengkap di RSUD Kota Malang	➢ Ketersediaan Sarana dan prasarana serta SDM kesehatan yang belum memadai	➢ Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan RSUD yang tinggi	➢ Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang kurang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 1 tahun 2019 pada tanggal 22 Maret 2019, ditetapkan Visi dan Misi serta Program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang juga harus ditelaah dan menjadi rujukan Dinas Kesehatan dalam menyusun program kerja dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Tabel 3.2.1. Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

No	Visi/ Misi/ Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	2	3	4	5	6
	Visi : Kota Malang Bermartabat ((Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkharakter – Kota yang Lembut & Tegas – Aman & Nyaman – Penuh Kesadaran Positif) Misi : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga				
	Program Kerja Walikota/ Wakil Walikota/ Prioritas bidang kesehatan : 1) *Universal Health Coverage (UHC)* - 100% Warga Kota Malang mendapat Jaminan Kesehatan BPJS, warga tidak mampu ditanggung Pemkot 2) Upgrade Kualitas Layanan Puskesmas 3) Unit Layanan Kesehatan 24 Jam, lengkap dengan dokter jaga dan perawat di setiap kelurahan 4) JAMPERSAL 1 Juta Rupiah 5) Ambulan Gratis tiap Kelurahan, penambahan 100 armada dengan waktu tunggu 15 menit 6) Preventif dan Promotif Kesehatan masyarakat dan kualitas	Dinas Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan; 2) pengelolaan upaya kesehatan; 3) pendayagunaan tenaga kesehatan; 4) pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; 5) pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; 6) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan; 7) pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 8) pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 9) pelaksanaan promosi kesehatan; 10) pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; 11) pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; 12) pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga; 13) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya; 14) pelaksanaan pemungutan	-	-	-

No	Visi/ Misi/ Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasa lahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	2	3	4	5	6
	hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga	retribusi daerah; 15) koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; 16) Pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan; 17) pengelolaan administrasi umum; 18) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan 19) penyelenggaraan UPT.			

Sedangkan tujuan, sasaran dan strategi bidang kesehatan yang ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Kota Malang 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
- Strategi : Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan

3.3. Telaah Renstra K/ L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Seperti halnya Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementrian Kesehatan juga memiliki Renstra yang juga harus menjadi salah satu rujukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dalm menyusun perencanaan program dan kegiatannya sehingga “linier” dan dapat mendukung tercapainya target program nasional di bidang kesehatan.

Pada saat ini, merupakan periode akhir Renstra Kementrian Kesehatan seperti halnya periode Pemerintahan yang akan berakhir pada tahun 2019. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, seiring dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun ini, juga harus menyesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023, seperti periode Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang terpilih.

Oleh karena kondisi periode pemerintah yang berbeda ini, maka telaah Renstra Kementerian Kesehatan dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang 2019 – 2023, didasarkan dan merujuk pada Renstra Kementerian Kesehatan periode 2015-2019.

Kondisi pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan secara Nasional dapat dilihat dan di telaah dengan menelaah Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan pada tahun terakhir saat penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang 2019 – 2023, yaitu tahun 2017.

No	Indikator	Capaian Kinerja			2019
		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat				
a.	Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)*, diukur dengan proksi:	n.a.	n.a.	n.a.	306
	Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	77	81,0	87	85
	Kunjungan Antenatal (K4) (persen)	74	85,0	86	80
b.	Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)*, diukur dengan proksi:	n.a.	n.a.	n.a.	24
	Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)	78	81	85	90
c.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	30,5	29,6	28,8	28
d.	Angka kelahiran total *(Total Fertility Rate/TFR)*	2,36	2,33	2,31	2,28
e.	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	65,4	65,6	65,8	66,0
2	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular				
a	Prevalensi HIV (persen)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
b	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	271	262	254	245
c	Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen)	6,4	5,9	5,6	5,4
d	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	24,6	24,2	23,8	23,4
e	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4	15,4	15,4	15,4
3	Meningkatnya Perlindungan Finansial				
	Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)	68	77	85	Min. 95
4	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
a	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	190	287	294	481
b	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	80	85	92,5	95
c	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	2.000	3.000	4.200	5.600
d	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	80*	85	90	95
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan				

Salah satu Misi pembangunan nasional, adalah pada bidang kesehatan yaitu “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera” dan merupakan salah satu agenda nawacita, yaitu : “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

Dalam rangka mewujudkan cita cita pembangunan nasional bidang kesehatan, beberapa kondisi dan tantangan yang masih ada dan diusahakan penyelesaiannya adalah :

1. Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar
2. Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
3. Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat

Dalam upaya menyelesaikan dan atau mengurangi persalahan tersebut Kementerian kesehatan menetapkan arah kebijakan pembangunan kesehatan : "Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung Program Indonesia Sehat" dengan fokus kebijakan pembangunan nasional Bidang Kesehatan adalah Penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui :

1. penguatan upaya promotif dan preventif,
2. pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional,
3. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta
4. penurunan kematian ibu dan kematian bayi

Tabel 3.3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

No	Renstra Kementerian Kesehatan	Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Malang	Permasalahan	Faktor	
				Pengham bat	Pendorong
	Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Dinas Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	-		
1	1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatnya Akses, Kemandirian, Dan Mutu Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/L	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan; 2. pengelolaan upaya kesehatan; 3. pendayagunaan tenaga kesehatan; 4. pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; 5. pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; 6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung	➢ Terbatas nya ketersediaan lahan dalam mengembang kan beberapa gedung Puskes mas yg berlokasi sesuai dengan wilayah kerja puskes mas ➢ Keterba tasan SDM kesehatan khusus nya di puskes mas	➢ Tidak adanya formasi peneri ma an/ penam ba han ASN/ PNS ➢ Adanya kebijak an/ ketent uan yg memba tasi perekr utan tenaga Non ASN Perang kat Daerah	➢ Kebija kan dan prioritas Walikota tentang peningk atan kualitas layanan keseha tan yg tertung dalam doku men RPJMD Kota Malang 2018-2023 ➢ Dukung an Angga ran dari APBD yg mema dai

No	Renstra Kementerian Kesehatan	Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Malang	Permasalahan	Faktor	
				Pengham bat	Pendorong
	embaga 7. Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri 8. Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan-Evaluasi 9. Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 10. Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih 11. Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan 12. Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi	perumusan kebijakan; 7. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 8. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 9. pelaksanaan promosi kesehatan; 10. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; 11. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; 12. pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga; 13. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya; 14. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah; 15. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; 16. Pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan; 17. pengelolaan administrasi umum; 18. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan 19. penyelenggaraan UPT.			

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Seperti halnya Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga memiliki Renstra. Pada saat ini, merupakan periode akhir Pemerintahan yang akan berakhir pada tahun 2019. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, seiring dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun ini, juga harus menyesuaikan

dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023, seperti periode Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang terpilih.

Oleh karena kondisi periode pemerintah yang berbeda ini, maka telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang 2018 – 2023, didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.

Hasil pencapaian 8 (delapan) kinerja sasaran strategis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sbb :

1) Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat mendapat kategori sangat baik.
2) Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat mendapat kategori sangat baik.
3) Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal mendapat kategori sangat baik.
4) Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana mendapat kategori sangat baik.
5) Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat mendapat kategori sangat baik.
6) Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman mendapat kategori baik.
7) Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan professional mendapat kategori baik.
8) Meningkatnya pembiayaan kesehatan mendapatkan kategori baik.

Tabel 3.3.2.1. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Malang	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Sasaran Renstra Provinsi				
1	Sasaran strategis: a. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat b. Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. c. Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal d. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana e. Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat f. Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman	Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Sasaran : 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	➢ Terbatas nya ketersediaan lahan dalam mengembangkan beberapa gedung Puskes mas yg berlokasi sesuai dengan wilayah kerja puskes mas ➢ Keterbatasan SDM kesehatan khusus nya di puskes mas	➢ Tidak adanya formasi penerimaan/ penambahan ASN/ PNS ➢ Adanya kebijakan/ ketentuan yg membatasi perekrutan tenaga Non ASN Perangkat Daerah	➢ Kebijakan dan prioritas Walikota tentang peningkatan kualitas layanan kesehatan yg tertung dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023 ➢ Dukungan Anggaran dari APBD yg memadai

No	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Malang	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	g. Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan h. Meningkatnya pembiayaan kesehatan				
	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan serta tugas pembantuan dan menyelenggarakan fung si: a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan; 2. pengelolaan upaya kesehatan; 3. pendayagunaan tenaga kesehatan; 4. pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; 5. pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; 6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan; 7. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 8. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 9. pelaksanaan promosi kesehatan; 10. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; 11. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; 12. pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;			

No	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Malang	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		13. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya 14. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah; 15. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; 16. Pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan; 17. pengelolaan administrasi umum; 18. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan 19. penyelenggaraan UPT.			

Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan kesehatan di Jawa Timur adalah :

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat
2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan
5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”.
2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“.
3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan” maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi penanggulangan masalah gizi“ dan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan

akibat bencana“ serta “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat“.

4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber daya kesehatan“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan” dan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan” dan “Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil”.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Telaah rencana tata ruang wilayah, merujuk pada Revisi RTRW Kota Malang Tahun 2017-2032, yang pada periode 5 tahun ke depan (2018-2023) masuk dalam periode tahap I ()2017-2021) dan tahap II (2022-2026) dengan kebijakan RTRW Kota Malang bidang kesehatan sbb :

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
1	2	3	4	5	6	7	8
II.3	Zona Sarana Pelayanan Umum	Upaya Pengembangan sarana kesehatan	Seluruh Wilayah Kota Malang	✓	✓	✓	✓

Pengembangan Zona sarana pelayanan umum melalui upaya pengembangan sarana kesehatan akan dilaksanakan selama periode 2018-2023 melalui :

a. Pengembangan fasilitas umum pelayanan kesehatan dilakukan dengan :
   1) mempertahankan lokasi rumah sakit yang ada;
   2) mengembangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masing-masing sub wilayah kota dan Puskesmas pembantu pada masing-masing skala lingkungan wilayah kota
b. Rencana pemenuhan fasilitas umum kesehatan, meliputi:
   1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
   2) penambahan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, apotik dan klinik KB, serta balai pengobatan yang persebarannya merata di setiap kecamatan.

Tabel 3.4.1.1. Telaah RTRW pada RPJMD Kota Malang

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
I 1.	RTRW : Upaya Pengembangan sarana kesehatan dilakukan dengan :	Dinas Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan			

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
	1) mempertahankan lokasi rumah sakit yang ada; 2) mengembangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masing-masing sub wilayah kota dan Puskesmas pembantu pada masing-masing skala lingkungan wilayah kota	➢ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : ➢ perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan; ➢ pengelolaan upaya kesehatan; ➢ pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; ➢ pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; ➢ pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya; ➢ penyelenggaraan UPT.	➢ Terbatasnya ketersediaan lahan dalam mengembangkan beberapa gedung Puskesmas yg berlokasi sesuai dengan wilayah kerja puskesmas ➢ Keterbatasan SDM kesehatan khususnya di puskesmas	➢ Tidak adanya formasi penerimaan/ penambahan ASN/PNS ➢ Adanya kebijakan/ ketentuan yg membatasi perekrutan tenaga Non ASN Perangkat Daerah	➢ Kebijakan dan prioritas Walikota tentang peningkatan kualitas layanan kesehatan yg tertung dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023 ➢ Dukungan Anggaran dari APBD yg memadai
2.	Rencana pemenuhan fasilitas umum kesehatan, meliputi : 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 2) penambahan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, apotik dan klinik KB, serta balai pengobatan yang persebarannya merata di setiap kecamatan				

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Malang ditentukan dengan melihat pada capaian masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Malang sesuai dengan kelompok kewenangan kota yang berjumlah 222 indikator. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2017.

Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari proses kajian lingkungan hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan 2 Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 bidang kesehatan, yaitu :

1. Meningkatkan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang belum mencapai/ memadai ada di Kota Malang.
2. Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata.

KLHS bidang kesehatan dapat dilihat pada Dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.1. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bidang Kesehatan

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
I	KLHS				
1	Meningkatkan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang belum mencapai/ memadai ada di Kota Malang	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Isu Strategis KLHS dlm RPJMD 2018-2023, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan; 2. pengelolaan upaya kesehatan; 3. pendayagunaan tenaga kesehatan; 4. pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; 5. pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; 6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan; 7. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 8. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 9. pelaksanaan promosi	➢ Keterbatasan SDM kesehatan khususnya di puskes mas terkait upaya pelayanan kesehatan jiwa	➢ Tidak adanya formasi penerimaan/ penmabahan ASN/PNS ➢ Adanya kebijakan/ ketentuan yg membatasi perekrutan tenaga Non ASN Perangkat Daerah	➢ Masih adanya kasus pasung pada ODGJ di Kota Malang ➢ Dukungan Anggaran dari APBD yg memadai

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
		kesehatan; 10. Penyelengga raan UPT.			
2	Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata	1. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 2. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 3. pelaksanaan promosi kesehatan; 4. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; 5. Pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan;	➢ Validasi data warga Kota Malang yg memiliki Jaminan Kesehatan yg belum optimal	➢ Koordinasi lintas sektor terkait JKN-BPJS yg belum optimal	➢ Kebijakan dan prioritas Walikota tentang UHC yg tertung dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023

3.5. Penentuan Isu–isu Strategis

Dalam penentuan isu isu strategis, beberapa faktor yang menjadi pedoman dan acuannya antara lain :

1) Gambaran pelayanan dan kinerja Dinas Kesehatan pada periode sebelumnya dan saat ini sbb :
   a. Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, hanya 2 indikator SPM dari 12 indikator SPM, yang mencapai target 100%.
   b. 10 indikator SPM Bidang Kesehatan lainnya masih belum mencapai target, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan pencapaian target indiktor SPM dengan pencapaian target di bawah 50% pada tahun 2018, sebanyak 4 indikator SPM
   c. Rendahnya capaian kinerja SPM tersebut, antara lain karena pendataan atau ketersediaan data penderita penyakit tersebut (hipertensi, diabetes mellitus dan HIV/AIDS) yang masih belum valid. Sehingga salah satu upaya yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah melakukan pendataan dengan baik dan benar sehingga dalam menyusun perencanaan intervensi/ kegiatan akan menjadi lebih baik. Disamping itu juga disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat pada umumnya tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus.
   d. Tingkat capaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), pada tahun 2017 juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebabnya dari sisi masyarakat oleh karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan keluarga penderita TBC tentang bahaya penyakit

tersebut, banyak penderita dan keluarganya yang tidak menyadari saat menderita penyakit tersebut. Selain itu, juga karena keterbatasan jumlah petugas kesehatan di puskesmas, sehingga tidak bisa secara maksimal menemukan kasus penyakit TBC di masyarakat

e. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang rendah capaian kinerjanya pada setiap tahun, oleh karena memang sedikit masyarakat miskin yang memanfaatkan rumah sakit (pelayanan rujukan). Kondisi seperti ini juga terjadi layanan dasar masyarakat miskin, yang juga rendah. Meskipun demikian sebagian besar masyarakat miskin Kota Malang sudah mendapatkan atau memiliki jaminan kesehatan sebagai peserta JKN, baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN maupun PBI-APBD.

2) Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan

a. Arah Kebijakan pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019, adalah Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung program indonesia sehat.

b. Sedangkan fokus kebijakan adalah Penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui :
   (1). penguatan upaya promotif dan preventif,
   (2). pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional,
   (3). penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta
   (4). penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

c. Kementrian Kesehatan menetapkan arah kebijakan sbb :
   (1). Penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*) di Puskesmas
   (2). Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (*continuum of care*)
   (3). Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*)

d. Kebijakan kementerian kesehatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan kementerian kesehatan yang telah ditetapkan yaitu :
   (1). Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :
      (a). Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
      (b). Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
      (c). Menurunnya BBLR
      (d). Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
   (2). Meningkatnya Responsiveness dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan , dengan indikator :
      (a). Meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan yg komprehensif dan bermutu
      (b). Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan

e. Sasaran pembangunan Kesehatan

No	Indikator	2018	2019
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat		
	a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)*, diukur dengan proksi:	n.a.	306
	b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)*	n.a.	24
	c. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	28,8	28
	d. Angka kelahiran total *(Total Fertility Rate/TFR)*	2,31	2,28
	e. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	65,8	66,0
2	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi HIV (persen)	<0,5	<0,5
	b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	254	245
	c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen)	5,6	5,4
	d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	23,8	23,4
	e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4	15,4
3	Meningkatnya Perlindungan Finansial		
	Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)	85	
4	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		
	a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	294	
	b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	92,5	
	c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	4.200	
	d. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	90	
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	80	

f. Tujuan dan sasaran tersebut akan di capai kementerian kesehatan melalui fokus program dan kegiatan sebagai berikut :

(1). Program Prioritas:

a. Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi, kesehatan reproduksi)

b. Perbaikan Gizi khususnya *stunting*

c. Pengendalian Penyakit Menular (HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria)

d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker)

(2). Prioritas kegiatan diutamakan ke Promotif & Preventif, termasuk kegiatan pro-aktif menjangkau sasaran ke luar gedung Puskesmas

(3). Fokus utama pada Pelayanan Kesehatan Dasar *(Primary Care)*

(4). Menjangkau sasaran utamanya dgn strategi pendekatan keluarga

(5). Pemenuhan ketersediaan obat & vaksin di puskesmas, termasuk introduksi vaksin baru
(6). Meningkatkan akses dan mutu yankes dasar & rujukan terutama di DTPK, KTI & lokasi tertentu (seperti tujuan wisata, kawasan ekonomi baru), termasuk pembangunan RS vertical di KTI
(7). Pemenuhan SDM kesehatan (Nusantara Sehat, tugas belajar, dll)
(8). Penguatan sistem informasi, manajemen, pembiayaan, dan litbang kesehatan
(9). Efektivitas program preventif (Germas)
(10). Kebijakan terkait Revolusi Mental:
a. Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
b. Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit,

3) Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Bidang Kesehatan
Sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, meliputi :
a. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
b. Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
c. Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal
d. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana
e. Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat
f. Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman
g. Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan
h. Meningkatnya pembiayaan kesehatan

4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan
Kebijakan RTRW Kota Malang selama periode 5 tahun ke depan, dengan Rencana pola ruang zona sarana pelayanan umum dengan indikasi program " Upaya pengembangan sarana kesehatan setiap tahun selama periode 2-18-2023, akan sangat mendukung perwujudan pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan Kota Malang yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023 yaitu " Meningkatnya kualitas layanan kesehatan "

5) Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Kesehatan
Dua Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 bidang kesehatan, yaitu :
a) Meningkatkan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang belum mencapai/ memadai ada di Kota Malang.
b) Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata.

Dengan didukung juga ketersediaan anggaran yang memadai dalam bidang kesehatan juga akan sangat mendukung percepatan terwujudnya tujuan Dinas Kesehatan Kota Malang yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan 2018 -2023 yaitu " Meningkatnya kualitas layanan kesehatan "

3.6. Isu Internasional

SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggapakan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tigas dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. Bidang kesehatan, dalam SDGs, merupakan goals ke 3 (tiga) yaitu : Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan *(Good Health and Wellbeing*) – menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;

3.6.1. Isu Nasional

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan pernyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Sesunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedang yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang :

a. bersifat mutlak; dan
b. mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. peiayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Luasnya cakupan pelayanan dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah menuntut perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling tidak dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan usaha yang

diberikan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di jajaran birokrasi pemerintah sendiri pengertian SPM masih sering dikacaukan dengan standar persyaratan teknis, standar kerja dan standar pelayanan prima. Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM

Dalam perkembangannya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, diperlukan penyesuaian termasuk Peraturan pelaksanaanya berupa peraturan menteri dalam negeri nomor 100 Tahun 2018. Kondisi ini tentunya akan butuh penyesuaian dalam pelaksanaan dan penerapan SPM di Pemerintahan Provinsi maupun pemerintah Kabupaten / Kota, termasuk Kota Malang dan Dinas Kesehatan

3.6.2. Isu Regional

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023, juga memperhatikan isu regional yang berkembang dan ada di Kota Malang khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang kesehatan, seperti kemiskinan yang ada.

Saat ini jumlah penduduk miskin di Wilayah Jawa Timur realtif cukup besar meskipun mengalami penurunan. Demikian juga denga Kota Malang Malang dengan penduduk miskin terendah di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS (BPS 3 Januari 2017), pada tahun 2015 per bulanseptember jumlah pendudukmiskin Jawa Timur sebanyak 4.775.970 jiwa atau 12,28%, kemudian menurun menjadi 4.638.530 jiwa atau 11.85% pada September tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 0,20 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2015 mencapai11,13% dan menjadi 10,70% pada tahun 2016. Jadi secara umum tingkat kemiskinan Jawa Timur menunjukkan tren yang cenderung menurun.

Kemiskinan penduduk ini sangat berpengaruh kepada kemampuan masyarakat, termasuk masyarakat miskin Kota Malang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan terlindungi Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini membutuhkan “pengelolan program” yang baik dan mampu menyentuh dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan dan terlindungi dengan Jaminan Kesehatan.

3.6.3. Isu Daerah/ Dinas Kesehatan

Penentuan data atau informasi dan permasalahan yang dapat menjadi isu strategis Dinas Kesehatan tetap merujuk pada isu strategis yang ada

pada Dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023 dan sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan;
3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya bidang kesehatan;
5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6) Prioritas janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang perlu diwujudkan.

Penetapan dan penentuan isu strategis urusan kesehatan merujuk pada isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023 dengan tahapan sbb :

Tabel 3.6.3.1. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang Urusan Kesehatan

Bidang Pembangunan	Tema Prioritas Pembangunan	Urusan	Isu Strategis
1	2	3	4
Bidang Pembangunan Manusia. Masyarakat, Sosial dan Budaya	Kesehatan	Urusan Kesehatan	1) Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu
			2) Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang
			3) Penurunan AKI, AKB, dan AKB
			4) Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita
			5) Peningkatan Kesehatan Lingkungan
			6) Kecukupan Tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis
			7) Mengupayakan Kota Malang bebas Pasung dan ODF *(Open Defecation Free)*

Tabel 3.6.3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum Optimalnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Kesehatan	1) Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal
		2) Belum Optimalnya kesadaran Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Berperilaku Sehat Dan Menjaga Kesehatan Lingkungan
		3) Belum Maksimalnya Penanganan Kualitas Hidup Pasien Terminal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Melalui Peran Aktif Dokter Keluarga;
		4) Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Secara Efektif Dan Efisien
		5) Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Semua Warga Kota Malang
		6) Syarat Kebersihan Dan Sertifikasi Layak Sehat Bagi Pengusaha Kuliner Dan Pedagang Kaki Lima;

Metode penilaian rating menggunakan interval penilaian dari angka 1 hingga 10. Semakin tinggi penilaian yang diberikan dapat diartikan bahwa isu tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kriteria yang ditentukan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria sebagaimana diadopsi dari Tim Rantek RPJMD Kota Malang 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.3.3. Skala Penilaian Metode Rating

Level Pengaruh	Skala Penilaian
Tidak berpengaruh	1-2
Kurang berpengaruh	3-4
Cukup berpengaruh	5-6
Berpengaruh	7-8
Sangat berpengaruh	9-10

Tabel 3.6.3.4. Pembobotan Daftar Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang Urusan Kesehatan

No	Isu Strategis Urusan Kesehatan	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu	9	9	9	7	6	8	48
2	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	8	7	7	7	7	6	42
3	Penurunan AKI, AKB, dan AKB	8	7	7	7	7	7	43
4	Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita	8	7	7	6	6	5	39
5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	8	7	8	7	5	5	40
6	Kecukupan Tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis	8	7	8	7	6	5	41
7	Mengupayakan Kota Malang bebas Pasung dan ODF *(Open Defecation Free)*	6	7	8	8	4	7	40

Tabel 3.6.3.5. Rata-rata skor Isu Strategis Pembangunan Kota Malang Urusan Kesehatan

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu	48	8
2	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	42	7
3	Penurunan AKI, AKB, dan AKB	43	7.1

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
4	Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita	39	6.5
5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	40	6.6
6	Kecukupan Tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis	41	6.8
7	Mengupayakan Kota Malang bebas Pasung dan ODF (*Open Defecation Free*)	40	6.6

Adapun setelah dilakukan pembobotan isu isu strategis tersebut maka di lakukan ranking terhadap isu isu strategis urusan kesehatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.6.3.6. Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Isu Strategis	Total Skor	Ranking
1	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu	48	1
2	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	42	3
3	Penurunan AKI, AKB, dan AKB	43	2
4	Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita	39	7
5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	40	5
6	Kecukupan Tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis	41	4
7	Mengupayakan Kota Malang bebas Pasung dan ODF *(Open Defecation Free)*	40	6

Dari hasil penentuan rangking isu strategis tersebut kemudian ditentukan urutan isu strategis Dinas Kesehatan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang 2018-2023 dan tetap disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023 dan sesuai dengan kriteria dalam penentuan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.6.3.7. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

Isu strategis Dinas Kesehatan Prioritas	Tujuan Dinas Kesehatan	Sasaran Dinas Kesehatan	Isu Kota Malang	Misi Kota Malang
1	2	3	4	5
1) Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu 2) Penurunan AKI, AKB, dan AKB 3) Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang 4) Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita 5) Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Meningkat nya kualitas layanan kesehatan	1) Peningkatan kualitas dan aksesibili tas pelayanan kesehatan 2) Meningkatny a status kesehatan masyarakat 3) Meningkatny a kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya	Menjamin akses dan kualitas pendidikan , kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga

Isu strategis Dinas Kesehatan Prioritas	Tujuan Dinas Kesehatan	Sasaran Dinas Kesehatan	Isu Kota Malang	Misi Kota Malang
1	2	3	4	5
6) Mengupayakan Kota Malang bebas Pasung dan ODF *(Open Defecation Free)* 7) Kecukupan Tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis				

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

a. Tujuan Dinas Kesehatan

Tujuan dinas kesehatan merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh dinas kesehatan dalam periode 2018 - 2023. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis pada Dinas Kesehatan Kota Malang. Tujuan dinas kesehatan menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi Dinas Kesehatan.

Dengan merujuk pada isu strategis dan permasalahan bidang kesehatan di Kota Malang saat ini serta memperhatikan Visi, Misi dan Tujuan Kota Malang yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023, maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan Kota Malang sbb :
"Meningkatnya kualitas layanan kesehatan"
Dengan indikator kinerja tujuan : Indeks Kesehatan

b. Sasaran Dinas Kesehatan

Sasaran perangkat daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam memformulasikan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi dinas kesehatan atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan dinas kesehatan. Sasaran Dinas Kesehatan yang ditetapkan merupakan sasaran pada level Dinas Kesehatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan dan akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan disusun selama periode 2018-2023.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023, maka ditetapkanlah sasaran Dinas Kesehatan Kota Malang, sbb :
Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan		Indeks Kesehatan	n.a.	0,814	0,816	0,818	0,820	0,823	0,825	0,825
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	% Puskesmas yang terakreditasi	93,75 (15 Pusk)	100 (16 pusk)	100	100	100	100	100	100
			% RS yang terakreditasi	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkat nya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,77	72,83	72,83	72,89	72,96	73,02	73,10	73,10
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	72,87	77,46	75,65	80,5	82,05	83,5	84,9	84,9

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penetapan Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan periode 2018-2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi kondisi capaian kinerja sasaran dan program Renstra Dinas Kesehatan pada periode sebelumnya. Selain itu juga mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota terpilih dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023.

Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kesehatan, sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan Dinas Kesehatan. Analisis dan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kesehatan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Kesehatan, dilakukan dengan analisis sederhana SWOT sebagaimana matrik dan tabel berikut.

Tabel 5.1.1 Identifikasi Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Dinas Kesehatan Kota Malang

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	PELUANG (0PPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
	1. Adanya dukungan anggaran kesehatan untuk menunjang program dan kegiatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan termasuk bagi masyarakat miskin (O1) 2. Tersedianya fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dan mempunyai tenaga yang profesional di bidangnya (O2) 3. Komitmen Pemerintah Kota Malang yang tinggi dalam pembangunan kesehatan dengan adanya ditetapkannya tujuan *"Mewujudkan pemerataan akses dan kualitas kesehatan "* (O3) 4. Kerjasama antara pemerintah Kota Malang/ Dinas Kesehatan dengan institusi pendidikan (O4) 5. Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinkes dan Klinik (05)	1. Belum semua masyarakat/ warga Kota Malang memiliki Jaminan Kesehatan (T1) 2. Pola hidup penularan penyakit yang dipengaruhi oleh globalisasi dan arus informasi (T2) 3. Belum optimalnya pemanfaatan posyandu oleh warga masyarakat (T3) 4. Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (T4) 5. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya,dan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD (T5)
KEKUATAN (STRENGTHS)	ALTERNATIF STRATEGI (SO)	ALTERNATIF STRATEGI (ST)
1. Semua puskesmas telah terakreditasi (S1) 2. Tersedianya sarana prasarana, Standar Pelayanan dan stándar operasional prosedur (S2) 3. Adanya regulasi yang mendukung program kesehatan (S3) 4. Adanya program inovasi kesehatan di Puskesmas untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat(S4) 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang telah terakreditasi dan PPK -BLUD (S5)	➢ Optimalisasi Koordinasi, pembinaan dan monev dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar (puskesmas dan klinik) dan rujukan/ rumah sakit sesuai standar ➢ Optimalisasi efisensi anggaran dan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana serta obat obatan dan BMHP yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas dan rujukan	➢ Standarisasi kualitas layanan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD Kota Malang) ➢ Optimalisasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kota Malang melalui Jaminan Kesehatan JKN-BPJS dan Jaminan Kesehatan lainnya

KELEMAHAN (WEAKNESS)	ALTERNATIF STRATEGI (WO)	ALTERNATIF STRATEGI (WT)
1. Belum semua tenaga kesehatan terlatih tata laksana program kesehatan (W1) 2. belum optimalnya Perencanaan dan pemanfaatan anggaran di puskesmas (W2) 3. Belum optimalnya upaya promotif dan preventif dipuskesmas (W3) 4. Beberapa jenis ketenagaan SDM Kesehatan belum terpenuhi jumlahnya dipuskesmas dan jaringannya (W4) 5. UCI masih belum memenuhi target (W5) 6. Masih adanya kasus gizi buruk/ stunting (W6) 7. Puskesmas belum menjadi PPK BLUD (W7)	➢ Optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran dan kegiatan dalam rangka pemerataan jangkauan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat ➢ Peningkatan kapasitas teknis tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang bekerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi profesi bidang kesehatan	➢ Optimalisasi Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ➢ Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan (Gizi buruk/ stunting, Penyakit Menular dan Tidak menular) ➢ Peningkatan peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pemberdayaan UKBM termasuk Posyandu ➢ Penyediaan bahan makanan tambahan untuk mengatasi kasus gizi buruk

NO	SASARAN	INDIKATOR	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	% Puskesmas yang terakreditasi % RS yang terakreditasi	1. Optimalisasi Koordinasi, pembinaan dan monev dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar (puskesmas dan klinik) dan rujukan/ rumah sakit sesuai standar 2. Optimalisasi efisensi anggaran dan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana serta obat obatan dan BMHP yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas dan rujukan 3. Standarisasi kualitas layanan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD Kota Malang)	1. Standarisasi kualitas layanan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD Kota Malang)
2	Meningkat nya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	1. Optimalisasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kota Malang melalui Jaminan Kesehatan JKN-BPJS dan Jaminan Kesehatan lainnya 2. Optimalisasi Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan (Gizi buruk/ stunting, Penyakit Menular dan Tidak menular) 4. Peningkatan peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pemberdayaan UKBM termasuk Posyandu	1. Optimalisasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kota Malang melalui Jaminan Kesehatan JKN-BPJS dan Jaminan Kesehatan lainnya 2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan (Gizi buruk/ stunting, Penyakit Menular dan Tidak menular)

NO	SASARAN	INDIKATOR	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
			5. Penyediaan bahan makanan tambahan untuk mengatasi kasus gizi buruk	
3	Meningkat nya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi	Nilai SAKIP	1. Optimalisasi efisensi anggaran dan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana serta obat obatan dan BMHP yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas dan rujukan	1. Optimalisasi efisensi anggaran dan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana serta obat obatan dan BMHP yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas dan rujukan

Tabel 5.1. : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Target Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	1. Standarisasi kualitas layanan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD Kota Malang)	1) Puskesmas terakreditasi	16	16	16	16	16
			2) Puskesmas BLUD	2	16	16	16	16
			3) Rumah Sakit Umum Daerah terakreditasi	1	1	1	1	1
			4) Rumah Sakit Umum Daerah BLUD	1	1	1	1	1
		2. Optimalisasi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kota Malang melalui Jaminan Kesehatan JKN-BPJS dan Jaminan Kesehatan lainnya	5) Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat lainnya	95%	100%	100%	100%	100%
	Meningkat nya status kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan (Gizi buruk/ stunting, Penyakit Menular dan Tidak menular)	6) Optimalisasi Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	4. Optimalisasi efisensi anggaran dan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana serta obat obatan dan BMHP yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas dan rujukan	7) Penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Malang selama periode 2018 -2023 yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, di upayakan melalui program dan kegiatan.

Terkait dengan adanya penyempurnaan sebagai hasil evaluasi dari penilaian SAKIP pada periode sebelumnya, maka pada nomenklatur program yang dipakai pada tahun 2018-2019 dilakukan penyempurnaan sehingga selama periode 2018 – 2023, nomenklatur program pada Dinas Kesehatan terbagi menjadi 2 macam sebagaimana berikut :

Program Dinas Kesehatan pada tahun 2019, sebanyak 21 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
5. Program Pengawasan Obat dan Makanan
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
8. Program pelayanan kesehatan dasar
9. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
10. Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
11. Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit
12. Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
13. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
15. Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
16. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan
17. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
18. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
19. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi
20. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi
21. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Setelah disempurnakan sebagai tindaklanjut dari hasil evaluasi dan penilaian SAKIP serta penyederhaan nomenklatur program , maka pada tahun selanjutnya (2020-2023) sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023 yag telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2. Program BLUD Puskesmas
3. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
4. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
5. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

7. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Masyarakat

Untuk mendukung pencapaian target program tersebut, maka ditetapkan indikator program dan di jabarkan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TAHUN 2018 -2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya pemerataan akses dan kualiyas kesehatan	1 Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan																			
			1 Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase puskesmas yang telah mengikuti penilaian / survey akreditasi	93,75		100%	27.122.626.257												
				Persentase klinik swasta berijin			100%													
			1 Operasional Puskesmas Kedungkandang	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	506.886.607											Puskesmas Kedungkandang	
			2 Operasional Puskesmas Kendalsari	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	482.975.150											Puskesmas Kendalsari	
			3 Operasional Puskesmas Arjuno	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	374.587.000											Puskesmas Arjuno	
			4 Operasional Puskesmas Bareng	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	414.119.000											Puskesmas Bareng	
			5 Operasional Puskesmas Pandanwangi	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di			12 bulan	435.127.500											Puskesmas Pandanwangi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				puskesmas																
			6 Operasional Puskesmas Cisadea	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	184.400.000											Puskesmas Cisadea	
			7 Operasional Puskesmas Kendalkerep	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	437.461.000											Puskesmas Kendalkerep	
			8 Operasional Puskesmas Mojolangu	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	524.173.000											Puskesmas Mojolangu	
			9 Operasional Puskesmas Dinoyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	441.019.000											Puskesmas Dinoyo	
			10 Operasional Puskesmas Janti	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	292.566.000											Puskesmas Janti	
			11 Operasional Puskesmas Ciptomulyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	388.849.000											Puskesmas Ciptomulyo	
			12 Operasional Puskesmas Mulyorejo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	416.973.000											Puskesmas Mulyorejo	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			13 Operasional Puskesmas Arjowinangun	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	420.103.000											Puskesmas Arjowinangun	
			14 Operasional Puskesmas Gribig	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	349.654.000											Puskesmas Gribig	
			15 Operasional UPT P3K	Operasional P3K untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat			12 bulan	102.050.000											UPT P3K	
			16 Operasional Puskesmas Polowijen	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	837.226.000											Puskesmas Polowijen	
			17 Operasional Puskesmas Rampal Celaket	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas			12 bulan	397.991.000											Puskesmas Rampal Celaket	
			18 Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.462.104.000											Puskesmas Kendalkerep	
			19 Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.371.384.000											Puskesmas Pandanwangi	
			20 Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.852.992.000											Puskesmas Kedungkandang	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			21 Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	988.920.000											Puskesmas Gribig	
			22 Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.185.912.000											Puskesmas Arjowinangun	
			23 Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.965.888.000											Puskesmas Janti	
			24 Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.158.552.000											Puskesmas Ciptomulyo	
			25 Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.100.448.000											Puskesmas Mulyorejo	
			26 Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.571.472.000											Puskesmas Dinoyo	
			27 Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	826.488.000											Puskesmas Mojolangu	
			28 Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.109.736.000											Puskesmas Arjuno	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			29 Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	910.080.000											Puskesmas Bareng	
			30 Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	713.448.000											Puskesmas Rampal Celaket	
			31 Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	819.504.000											Puskesmas Cisadea	
			32 Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	1.221.840.000											Puskesmas Kendalsari	
			33 Operasional UPT Puskesmas Polowijen (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN			12 bulan	326.448.000											Puskesmas Polowijen	
			34 Penguatan manajemen puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian kinerja puskesmas ; Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian puskesmas berprestasi ; Jumlah peserta pertemuan monev perkesmas ; Jumlah peserta pertemuan monev laboratorium puskesmas ; Jumlah peserta dalam koordinasi			16 puskesmas ; 16 puskesmas dinilai untuk seleksi puskesmas berprestasi ; 80 peserta ; 80 peserta ; 20 orang ; 200 orang	409.620.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				pembentukan TIK PIS-KS ; Jumlah peserta yang mengikuti monev PIS-PK ;																
			35 Penguatan dan operasional Public Safety Centre (PSC)	Jumlah tenaga bantu PSC (medis, paramedis) ; Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi PSC ; Jumlah peserta yang mengikuti monev kegiatan PSC ; Jumlah peserta yang mengikuti studi banding PSC 119 ; Sarana yang melengkapi kegiatan PSC 119 ;			8 tenaga pengemudi, 10 tenaga paramedis, 3 tenaga dokter, 200 peserta sosialisasi PSC, 100 peserta koordinasi ; 240 peserta monev kegiatan PSC ; 40 peserta studi banding ; Papan pengumunan ; 1 paket software PSC ; 2 buah TV LCD ; 3 Android, 20 GPS, Masker, Handscoen, Spalk	873.930.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			36 Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	Jumlah klinik swasta yang mengikuti pertemuan pembinaan fasilitas kesehatan primer ; Jumlah peserta pembina klinik / laboratorium pratama ;			240 peserta ; 120 orang	125.000.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			37 Reakreditasi puskesmas	Jumlah puskesmas yang akreditasi ulang ; Jumlah peserta yang mengikuti workshop keselamatan pasien ; Jumlah peserta yang mengikuti workshop audit internal / eksternal ; Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan pendampingan puskesmas			4 puskesmas terakreditasi ulang ; 100 peserta workshop keselamatan pasien ; 100 peserta workshop audit internal dan eksternal ; 20 orang Tim pendamping akreditasi	122.700.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase gedung/ kantor yang terpelihara dengan baik			100%	4.724.520.000												
				Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab																
			256 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui rehabilitasi gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang direhab			1 gedung puskesmas, 3 gedung puskesmas pembantu, 1 pagar gedung puskesmas pembantu	2.055.200.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			257 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang dipelihara			3 gedung puskesmas, 12 gedung puskesmas pembantu	2.669.320.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan , perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan	Persentase terpenuhinya alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas			90%	242.595.000												
				Persentase terpenuhinya ketersediaan obat, perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas			100%													
			38 Perencanaan, dan pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan	Jumlah peserta bimtek pemakaian obat rasional ; Jumlah peserta bimtek pengelolaan obat			50 orang peserta bimtek obat rasional ; 50 orang peserta bimtek pengelolaan obat	147.995.000											Seksi Kefarmasian	
			39 Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan			76 orang	94.600.000											Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi	Persentase terpenuhinya alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas			90%	8.038.355.000												
			40 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasamad g Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas (DBHCHT)	Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan			3 paket	3.850.069.650											Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
			41 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu	Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan			1 paket	484.000.000											Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			42 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	Jumlah Obat obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas			3 paket	3.704.285.350	3 paket										Seksi Kefarmasian	
			4 Program Pengawasan obat dan makanan	Persentase sampel kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat			30%	752.005.000												
				Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat			60%													
				Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat / standart			40%													
				Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang diawasi dan memenuhi syarat / standart			100%													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			43 Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika	Jumlah sampel kosmetika yang diuji ; Jumlah rekomendasi ijin salon yang diterbitkan ; Jumlah penanggungjawab salon yang mengikuti bimtek pemilihan dan penggunaan kosmetika yang tepat ; Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kosmetika			80 sarana kosmetika ; 10 rekomendasi ; 80 orang ; 100 orang	150.000.000											Seksi Kefarmasian	
			44 Pengawasan, pembinaan keamanan pangan	Jumlah sertifikat IRTP yang diterbitkan ; Jumlah sarana produksi IRTP yang diawasi ; Jumlah sampel pangan yang beredar di masyarakat yang diuji ; Penyuluhan keamanan pangan untuk masyarakat ; Penyuluhan keamanan kpd IRTP dlm rangka sertifikasi ; Jumlah siswa sekolah yg mendapat penyuluhan keamanan pangan			300 sertifikat ; 300 sarana ; 140 sampel ; 100 orang ; 240 orang ; 600 siswa	311.425.000											Seksi Kefarmasian	
			45 Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisonal	Jumlah sarana obat tradisional yang diawasi ; Jumlah ijin UMOT yang diterbitkan ; Jumlah rekomendasi UKOT yang diterbitkan ; Jumlah pengelola jamu yang menjadi peserta			40 sarana obat tradisional ; 50 orang pengelola jamu ; 100 orang masyarakat	100.000.000											Seksi Kefarmasian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				pertemuan pembinaan ; Jumlah masyarakat yang mengikuti																
			46 Pengawasan dan pembinaan kefarmasian	Jumlah sarana farmasi yang dibina dan diawasi ; Jumlah ijin sarana farmasi yang diterbitkan ; Jumlah peserta pertemuan swamedikasi ; Jumlah peserta pertemuan yang mengikuti bimtek farmasi komunitas			100 sarana farmasi ; 100 perijinan sarana farmasi ; 150 orang peserta swamedikasi ; 150 orang peserta bimtek farmasi komunitas	190.580.000											Seksi Kefarmasian	
			5 Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Penyehat tradisional ramuan dan ketrampilan yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)			10%	164.362.000												
				Persentase kelurahan yang memiliki asuhan mandiri dg SK Kepala Kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas			10%													
			47 Pembinaan dan penilaian asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan			32 orang kader kesehatan dan pengelola program puskesmas ; 3 narasumber	65.000.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			48 Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah peserta pertemuan pembinaan penyehat tradisional ; Jejaring pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional			232 orang penyehat tradisional, asosiasi dan lintas sektor serta pengelola program puskesmas	99.362.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	
			6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			100%	5.998.344.900												
			49 Penguatan puskesmas BLUD	Jumlah puskesmas yang mengikuti workshop penguatan BLUD			16 puskesmas	220.000.000											Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			50 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendal Kerep	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	62.539.000											Puskesmas Kendalkerep	
			51 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Pandanwangi	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	74.725.000											Puskesmas Pandanwangi	
			52 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kedung kandang	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	119.342.000											Puskesmas Kedungkandang	
			53 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Gribig	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	50.916.000											Puskesmas Gribig	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			54 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjowinangun	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	45.397.000											Puskesmas Arjowinangun	
			55 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	81.796.000											Puskesmas Janti	
			56 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Ciptomulyo	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	32.511.000											Puskesmas Ciptomulyo	
			57 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mulyorejo	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	81.977.000											Puskesmas Mulyorejo	
			58 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	264.418.000											Puskesmas Dinoyo	
			59 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mojolangu	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	88.822.000											Puskesmas Mojolangu	
			60 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjuno	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	80.925.000											Puskesmas Arjuno	
			61 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Bareng	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	82.830.000											Puskesmas Bareng	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			62 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Rampal Celaket	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	25.009.000											Puskesmas Rampal Celaket	
			63 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Cisadea	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	62.684.000											Puskesmas Cisadea	
			64 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendalsari	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	97.994.000											Puskesmas Kendalsari	
			65 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Polowijen	Jumlah pasien terlayani di puskesmas			12 bulan	101.914.000											Puskesmas Polowijen	
			66 Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	Jumlah pasien terlayani di RSUD			12 bulan	4.424.545.900											RSUD	
			7 Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek			85%	1.523.725.000												
			67 Pemilihan tenaga kesehatan teladan	Jumlah peserta pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang			60 orang	111.200.000											Seksi SDM Kesehatan	
			68 Pembinaan kelompok budaya kerja	Keikutsertaan UPT Dinas Kesehatan dalam lomba Kelompok Budaya Kerja			26 orang	46.300.000											Seksi SDM Kesehatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			69 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan	Jumlah peserta pelatihan GELS ; Jumlah peserta pelatihan BLS ; Jumlah peserta pelatihan BTLS ; Jumlah peserta pelatihan kalibrasi ; Jumlah peserta pelatihan epidemiologi ; Jumlah peserta pelatihan promkes ; Jumlah peserta pelatihan IVA ; Jumlah peserta pelatihan Keswa ;Jumlah peserta pelatihan DOTS TB ; Jumlah peserta pelatihan program kusta ; Jumlah peserta pelatihan teknis DBD ; Jumlah peserta pelatihan PPI ; Jumlah peserta pelatihan Midwifery Update			40 orang ; 40 orang ; 40 orang ; 4 orang ; 5 orang ; 160 orang ; 34 orang ; 34 orang ; 48 orang ; 34 orang ; 34 orang ; 35 orang ; 35 orang	1.081.225.000												Seksi SDM Kesehatan	
			70 Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang berijin			5000 orang	285.000.000											Seksi SDM Kesehatan	
			8 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang telah terakreditasi dan telah lulus credensialing			80%	613.086.650												
			71 Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional			24 FKTL	225.309.150											Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			72 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing			12 FKTL	80.659.850											Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			73 Peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah tenaga kesehatan yang memahami dan mampu melaksanakan sistem penanggulangan krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran dan Tim penanggulangan krisis kesehatan			50 orang tenaga kesehatan	168.504.850											Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			74 Pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan	Jumlah tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan dan Tim pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan			50 orang tenaga kesehatan	138.612.800											Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			9 Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	NDR (Net Death rate)	1%	2%	< 2%	25.575.454.100												
				Persentase Layanan RS Sesuai Standar																

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			75 Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan			Honorarium PNS 11 bulan; Lembur PNS 3000 Jam; ATK 14 Jenis; benda pos 2 jenis; Alat perlengkapan kantor 20 jenis; Belanja sertifikasi 15 orang ; Belanja dekorasi/dokumentasi 4 paket; Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40 jam ; Belanja penggandaan 3 jenis ;Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5 kali;Belanja makanan dan minuman rapat 3 jenis; Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3 jenis;Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 jenis;	1.644.732.650											RSUD	RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa Bumiayu
							Belanja sosialisasi 1 kali; Belanja bimbingan teknis 4 paket; Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 15 jenis;Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah 2 jenis; Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan 2 jenis; Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya 2 jenis.													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			76 Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan			Belanja alat listrik dan elektronik 48 jenis, Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih 35 jenis, Belanja pengisian tabung gas 2 paket, Pengisian tabung Gas Medis 1 paket, Belanja bahan obat-obatan 30 jenis, Belanja bahan makanan 1 tahun, Spare part untuk alat kesehatan 1 paket, Spare part untuk komputer 1 paket, Belanja barang perlengkapan kantor 63 Jenis, Belanja Sertifikasi 7 jenis, pemeriksaan lab dan radiologi 1 paket, uji kualitas lingkungan 1 paket,	5.668.696.400											RSUD	RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa Bumiayu
			77 Operasional Rumah Sakit	Jumlah operasional rumah sakit			honorarium PNS dan Non PNS 12 bulan, 55 jenis ATK, Bahan bakar minyak/gas 12 bulan, 3 jenis barang perlengkapan kantor, rekening air,telepon, listrik 12 bulan, 2 jenis belanja jasa dekorasi/dokumentasi ,7 unit belanja STNK,	14.569.557.700											RSUD	RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa Bumiayu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
							3 jenis honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber, 4 unit premi asuransi, 21 kali jasa servis, 12 kali penggantian suku cadang, BBM/pelumas 12 bulan, 12 jenis belanja cetak, 3 jenis belanja penggandaan, 1 unit belanja sewa gedung, 2 kali sewa kendaraan hias, 200 buah belanja sewa meja kursi,													
							2 kali sewa pakaian adat/tradisional, 1 paket belanja sewa alat pesta hiburan, 3 jenis makan minum tamu, 3 jenis makan minum rapat, 50 kali perjalanan dinas dalam daerah, 12 kali perjalanan dinas luar daerah, 31 kali kursus singkat/pelatihan/kontribusi,3 jenis pemeliharaan peralatan dan mesin,													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
							31 kali kursus singkat/pelatihan/ kontribusi,3 jenis pemeliharaan peralatan dan mesin, 1 unit modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus,1 unit belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor, 1 unit pengadaan perlengkapan kantor, 5 unit pengadaan lemari, 4 buah papan nama/himbauan/pen gumuman,													
							2 unit komputer notebook, 6 unit printer, 15 unit UPS, 6 unit kelengkapan komputer, 2 unit rak, 1 unit proyektor													
			78 Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit	Jumlah gedung yang terehabilitasi			3 paket	1.192.467.350											RSUD	RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa Bumiayu
			79 Pembuatan lahan parkir RSUD	Pembuatran pagar dan paving lahan parkir			1 paket	2.500.000.000											RSUD	RSUD Kota Malang, Jl. Rajasa Bumiayu
	2 Meningkatnya status kesehatan																			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
	masyarakat																			
			14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase balita (0-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			100%	1.300.000.000												
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			100%													
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			100%													
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar			100%													
			138 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (UPHP KIA)	Jumlah peserta pertemuan pemantapan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak			100 orang bidan	100.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			139 Optimalisasi antenatal care afternoon report (ACAR)	Jumlah bidan yg melaksanakan ACAR dan rujukan dini berencana ; jumlah ibu hamil yang melakukan rujukan dini berencana			65 org bidan, 16 Ka. Pusk, 7 RS Rujukan ; 570 ibu hamil	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			140 Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisian Buku KIA	Jumlah peserta pertemuan upaya penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA ; Jumlah buku KIA yang dicetak ; Jumlah kohort ibu yang dicetak ; Jumlah			73 bidan, 26 rumah sakit, 13.500 buku KIA, 73 Kohor Ibu	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				Rumah Sakit yang hadir																
			141 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi / KB	Jumlah peserta pertemuan upaya pemantapan hasil pelayanan kesehatan reproduksi / KB ; Jumlah puskesmas yang menggunakan PUS online			114 orang, 16 puskesmas menggunakan data PUS online	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			142 Audit Maternal Perinatal (AMP)	Jumlah pertemuan AMP ; Jumlah peserta lintas sektor dan dokter spesialis yang hadir			4 kali pertahun, 100 orang	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			143 Pemantapan Sistem Rujukan Maternal Neonatal	Jumlah peserta lintas sektor ; Rumah Sakit rujukan yang hadir			1 kali per tahun, 26 Rumah Sakit	200.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			144 Upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita	Jumlah kader posyandu yang dilatih SDIDTK ; Jumlah buku pedomen yang dicetak ; Penggandaan DDTK			100 kader, 100 buku, 100 DDTK Kit	200.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			145 PPIA (Pencegahan dan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak)	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan program PPIA ; jumlah sasaran PPIA			150 orang nakes, 16 puskesmas, 960 ibu hamil resti	200.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			15 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk			<0,45	10.164.970.700												

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			146 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam mencapai keluarga sadar gizi, jumlah siswa mendapatkan tablet Fe di sekolah, jumlah pertemuan lintas sektor			570 orang, 15 sekolah, 80 orang	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			147 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	Jumlah kader posyandu mendapat honorarium, jumlah posyandu yg melaksanakan intervensi masalah gizi			6041 kader posyandu, 646 posyandu	8.480.505.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			148 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS	Jumlah peserta pertemuan lintas sektor, pengadaan suplemen utk penderita HIV Aids			45 orang peserta pertemuan, 2400 kaleng susu	78.400.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			149 Pemantapan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	Jumlah puskesmas yang mencapai strata optimal sebagai Pusat Pemulihan Gizi Terpadu			3 puskesmas	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			150 Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja	Jumlah stake holder pada pertemuan Pelayanan Kesehatan dan Gizi pada Anak Prasekolah, Usia Sekolah dan Remaja ;			120 orang peserta pertemuan ; 1000 siswa, 400 siswa	150.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			151 Penanggulangan kekurangan gizi	Jumlah peserta / stake holder pada pertemuan penanggulangan kekurangan gizi			90 orang pertemuan KEP, 45 orang pertemuan anemia, 45 orang pertemuan GAKY, 70 org pertemuan KVA	545.400.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			152 Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah fasilitator pendamping, jumlah ibu hamil anemi dan atau KEK			114 orang, 570 keluarga	200.000.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			153 Pelayanan kesehatan/ Skrining anak usia sekolah	Jumlah siswa SD yang diskrinning ; Jumlah guru UKS yang dibina ; Jumlah kantin yang dibina			skrining anak sekolah 100 %siswa SD, 1 kali per tahun, 250 guru, 100 kantin 14.616 buku rapor kesehatanku;	410.665.700											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
	3 Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit		16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi	Persentase balita stunting			<25%	2.237.125.000												
			154 Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan suplemen makanan tambahan (DBH CHT)	Suplemen makanan bayi, Suplemen makanan balita, Suplemen makanan ibu hamil, Suplemen makananlansia dan Suplemen makanan tinggi energi tinggi protein			2300 kotak, 1900 kotak, 25250 kotak, 18000 kotak, 2100 kaleng	2.237.125.000											Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			18 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit	Persentase desa yang melaksanakan Posbindu PTM			100%	3.325.252.300												
				Prosentase jemaah haji dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan			100%													
				Persentase penemuan penderita kusta yang diobati dan sembuh			95%													
				Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani			100%													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penemuan Penderita Diare			100%													
				Penemuan Pasien Baru TB - BTA positif			75%													
				Penemuan penderita pneumonia balita			80%													
				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap			90%													
				Prosentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam			100%													
				Persentase ODGJ (Schizofrenia dan Psikotik) yang ditemukan dan ditangani			100%													
				Persentase Penderita DBD yang ditangani dan sembuh			100%													
				Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu			100%													
			183 Peningkatan kapasitas Pokja KIPI dan petugas	Pertemuan Konsultasi penanganan KIPI ; Worshop Pokja KIPI			30 Pokja, 100 org petugas	60.500.000											Seksi Surveilans dan Imunisasi	
			184 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Tenaga bantu Surveillance Epidemiologi Non PNS ; Pemeriksaan dan Pengiriman sampel KLB ; Review Pelatihan Penanggulangan KLB ; Peningkatan Kapasitas Survelliance Epidemiologi RS dalam penanggulangan KLB			1 tenaga bantu, 400 sampel, 30 kali pengiriman ,64 org	200.682.000											Seksi Surveilans dan Imunisasi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			185 Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilut	Jumlah peserta pertemuan pemantapan program Keswa dan Napza bagi petugas ; Jumlah peserta sosialisasi kesehatan jiwa bagi masyarakat ; Jumlah peserta pemantapan program kesehatan indra bagi petugas ; Jumlah peserta monev indra bagi petugas ; Jumlah pertemuan kesehatan gigi dan mulut bagi petugas ; Jumlah peserta sosialisasi kesehatan jiwa bagi guru ; Jumlah peserta sosialisasi perda KTR ; Jumlah peserta kegiatan jambore ODGJ ;			50 orang ; 57 orang ; 35 orang ; 35 orang ; 35 orang ; 60 orang ; 130 orang ; 12 orang	200.000.000											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			186 Peningkatan pelayanan imunisasi	Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah ; jumlah peserta workshop akselerasi imunisasi ; jumlah logistik imunisasi yang diadakan			12.500 bayi, 60.343 balita ; 35.837 anak sekolah ; 100 org petugas ; 12 kali pengambilan vaksin, 9 chold chain, 1 mobil imunisasi, 61 logistik imunisasi	765.000.000											Seksi Surveilans dan Imunisasi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			187 Peningkatan surveillance epidemiologi, imunisasi, kesehatan haji	Jumlah peserta pertemuan monev program SE , imunisasi dan kesehatan haji ; jumlah peserta pertemuan penyelenggaraan kesehatan haji bagi tim pemeriksa, institusi, KBIH ; jumlah pengambilan vaksin meningitis ; jumlah pengantaran dokumen dan jamaah haji ke embarkasi ; jumlah buku peraturan			259 orang ; 85 orang ; 1300 jamaah haji ; 100 buku	110.582.800											Seksi Surveilans dan Imunisasi	
			188 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah peserta monev penyakit jantung dan pembuluh darah pada petugas ; Jumlah peserta sosialisasi penyakit jantung dan pembuluh darah bagi masyarakat ; Jumlah peserta sosialisasi penyakit kronik dan degeneratif lainnya bagi petugas dan masyarakat ; Jumlah peserta pertemuan diabetes melitus dan pengendalian obesitas pada petugas dan masyarakat ; Jumlah peserta kegiatan pemeriksaan IVA dan sadanis ; Jumlah peserta pertemuan deteksi dini kanker serviks			35 orang petugas ; 57 orang masyarakat ; 92 orang petugas dan masyarakat ; 92 orang petugas dan masyarakat ; 100 orang ; 57 orang masyarakat ; 57 orang masyarakat, 50 org petugas, 4 paket, 4 paket	272.000.000											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				dan payudara pada masyarakat ; Jumlah peserta sosialisasi deteksi dini stroke bagi masyarakat,																
				workshop hipertensi dan stroke bagi petugas, belanja bahan kimia glucosa platinum, kolesterol stik ;															Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			189 Peningkatan pelayanan Posbindu	Jumlah peserta pertemuan PTM Posbindu pada petugas ; Jumlah peserta pertemuan PTM Posbindu pada masyarakat ; Pengadaan posbindu kit ;			35 orang ; 57 orang ; 7 paket	115.000.000											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			190 Pertemuan Program DBD	Jumlah peserta pertemuan monitoring evaluasi program DB ; Jumlah peserta pertemuan rakor pokjanal DBD ; Jumlah peserta pertemuan mentoring DBD bagi klinisi, Jumlah peserta workshop petugas fogging dan pemantau fogging			34 orang petugas ; 78 orang petugas dan masyarakat ; 36 orang petugas;32 petugas	144.074.400											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			191 Pertemuan program HIV / AIDS	Jumlah peserta pertemuan evaluasi WPA ; Jumlah peserta pertemuan evaluasi KPA Kota Malang ; Jumlah peserta pertemuan monev Harm Reduction ; Jumlah peserta pertemuan sarasehan penanggulangan HIV AIDS ; Jumlah peserta pertemuan dukungan bagi ODHA ; Jumlah peserta pertemuan jejaring layanan dan LSM ; Jumlah peserta pertemuan Rakerda KPAD Kota Malang ; Jumlah peserta pertemuan validasi data IMS dan HIV ; Jumlah peserta pertemuan monev PMTS ; Jumlah peserta pertemuan koordinasi klinik VCT ; Jumlah peserta workshop kader Pokci ; Jumlah petugas Talk Show penanggulangan HIV AIDS			50 org masyarakat ; 40 orang petugas dan masyarakat ; 20 orang petugas ; 100 orang masyarakat ; 40 orang masyarakat ; 54 orang petugas dan masyarakat ; 45 orang petugas dan masyarakat ; 26 orang petugas ; 20 orang petugas dan masyarakat ; 120 orang petugas dan masyarakat ; 35 orang masyarakat ; 8 orang petugas	600.442.700												Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			192 Pertemuan monev kusta	Jumlah peserta pertemuan monev kusta			40 orang petugas	12.232.000											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			193 Pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP / HPIS	Jumlah peserta pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP / HPIS			23 orang petugas puskesmas dan RS	10.553.400											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			194 Pertemuan evaluasi program kecacingan	Jumlah peserta pertemuan evaluasi program kecacingan			34 orang petugas	15.655.200											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			195 Pertemuan program TB	Jumlah peserta pertemuan validasi data TB ; Jumlah peserta pertemuan jejaring RS dan PKM ; Jumlah peserta pertemuan penguatan PPM ; Jumlah peserta pertemuan jejaring TB-DPS ; Jumlah peserta pertemuan evaluasi kohort TB MDR ; Jumlah peserta pertemuan penyegaran petugas laboratorium ; Jumlah peserta pertemuan monev TB-HIV, jumlah peserta pertemuan sosialisasi TB HIV dan workshop TB-RO			25 orang petugas ; 52 orang petugas ; 70 orang petugas dan organisasi profesi ; 70 orang dokter praktek mandiri ; 25 orang petugas ; 26 orang petugas ; 44 orang petugas, 960 orang masyarakat, 56 orang petugas	750.219.800											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			196 Pertemuan Monev ISPA	Jumlah peserta pertemuan monev ISPA			23 orang petugas puskesmas dan RS	10.553.400											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			197 Pertemuan validasi data IMS-HIV	Jumlah peserta pertemuan validasi data IMS-HIV			60 orang petugas puskesmas dan RS	57.756.600											Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
	4 Meningkatnya keberdayaan untuk kemandirian dan inovasi masyarakat pada bidang kesehatan																			
			20 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan		61,85%	100%	24.293.197.693												
				Persentase Posyandu Purnama Mandiri		80,00%	82%													
			214 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM)		1 tahun	1 tahun	5.168.197.693											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			215 Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (Pajak Rokok)	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan		68.914 jiwa	50.000 jiwa	15.000.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			216 Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional		16 FKTP	16 FKTP	600.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			217 Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional		6 FKTP	6 FKTP	300.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			218 Promosi kesehatan	Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat		10 media cetak, 15 media elektronika, 5 media luar ruang	5 media cetak, 5 media elektronika dan 5 media luar ruang	1.200.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			219 Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga	Jumlah kelurahan siaga aktif		57 kelurahan	57 kelurahan	600.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			220 Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri		360 posyandu	369 posyandu	600.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			221 Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya	Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri		1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia , 16 Pos UKK	1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia , 16 Pos UKK	600.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			222 Pengembangan Taman Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri		360 posyandu	369 posyandu	225.000.000											Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			21 Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Prosentase Inspeksi Sanitasi Terhadap TTU TPM			92%	1.740.338.600												
			223 Operasional Laboratorium Kesehatan	Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat			12 bulan	996.757.000											UPT Laboratorium Kesehatan	
			224 Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat	Jumlah peserta pertemuan pengurus Forum Malang Kota Sehat dan koordinasi dengan organisasi di bawahnya			20 orang pengurus forum ; 100 orang pengurus Pokja	132.126.100											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			225 Peningkatan hygiene sanitasi TTU/TPM	Jumlah TTU /TPM yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan ; Jumlah peserta pertemuan pengelolaan limbah medis dan sarana TTU TPM yang memenuhi syarat			50 orang penanggungjawab sarana kesehatan ; 150 TTU TPM yang dilaik sehat	27.721.500											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			226 Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS	Fasilitasi stop BABS			30 orang fasilitor, 5 lokasi	26.074.000											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			227 Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah peserta penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring evaluasi dan pelaporanprogram pengembangan lingkungan sehat ; Jumlah sampel air yang diperiksa ; Jumlah peserta pertemuan penyelenggara air minum			200 orang penjamah makanan ; 24 orang petugas kesling ; 15 orang Kapusk ; 630 sampel ; 100 orang ; 5 narasumber ; 25 orang ; 25 orang	279.581.500											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			228 Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat	Verifikasi dan evaluasi program sehat di Kota Malang ; Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat, lomba Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat;			20 orang Petugas verifikator , 300 orang tim teknis	249.078.500											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			229 Fasilitasi pelaksanaan program pasar sehat	Jumlah peserta pertemuan gugus tugas pasar sehat			60 orang ; 5 orang narasumber	29.000.000											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			22 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Olahraga			100%	1.629.079.800												
			230 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	Operasional PPKO untuk pelayanan kesehatan masyarakat			12 bulan	600.000.000											UPT PPKO	
			231 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	Jumlah sarana olahraga yg diadakan untuk pelayanan kesehatan olahraga			5 item, 20 buah	279.714.300											UPT PPKO	
			232 Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas	Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT			30 orang	34.890.500											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			233 Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan olahraga	Pelatihan pengukuran kebugaran bagi guru UKS dan guru olahraga di Kota Malang ; Bimtek program kesehatan olahraga di puskesmas ; Bimtek kesehatan olahraga di sekolah ; Bimtek kesehatan olahraga bagi petugas KBIH dan puskesmas			50 orang KBIH ; 57 orang masyarakat ; 30 orang kelompok olahraga	264.475.000											Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			234 Pengukuran kebugaran jasmani	Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani			1500 orang	450.000.000											UPT PPKO	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
	5 Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi																			
			23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan / Kecukupan Peralatan dan Perlengkapan Aparatur			100%	1.285.255.000												
			235 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik			12 bulan	300.000.000											Sub Bag Umum	
			236 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah			2 unit kendaraan roda empat	10.000.000											Sub Bag Umum	
			237 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			47 unit kendaraan operasional roda dua, 32 unit kendaraan operasional roda empat	60.000.000											Sub Bag Umum	
			238 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan			1.100 m2	245.000.000											Sub Bag Umum	
			239 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor			33 item	100.000.000											Sub Bag Umum	
			240 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			10 item barang cetakan , 1 paket foto copy.	75.000.000											Sub Bag Umum	
			241 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1 paket	20.000.000											Sub Bag Umum	
			242 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga			1 paket bahan pembersih	40.000.000											Sub Bag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			243 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3 (tiga) surat kabar	5.000.000											Sub Bag Umum	
			244 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman			Snack 1080 kotak dan nasi 1080 kotak	41.500.000											Sub Bag Umum	
			245 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			100%	388.755.000											Sub Bag Umum	
			24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Gedung/ Kantor yang Terpelihara dengan Baik			100%	2.593.500.000												
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi dengan Baik			100%													
			246 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			1 unit mobil sampel laboratorium	600.000.000											Sub Bag Umum	
			247 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor			1 paket perlengkapan kantor, 1 paket audio class	1.200.000.000											Sub Bag Umum	
			248 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 gedung kantor	195.000.000											Sub Bag Umum	
			249 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			6 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua	113.500.000											Sub Bag Umum	
			250 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah			1 dokumen	250.000.000											Sub Bag Umum	
			251 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			12 unit PC, 15 unit AC, 1 unit Mesin Fotocopi	35.000.000											Sub Bag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			252 Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus			1 paket	200.000.000											Sub Bag Umum	
			26 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kinerja Baik			100%	125.000.000												
			258 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur			1 kegiatan (25 orang)	75.000.000											Sub Bag Umum	
			259 Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1 kegiatan (75 orang)	50.000.000											Sub Bag Umum	
			27 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun Sesuai Jadwal			100%	746.525.000												
			260 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 jenis dokumen	21.475.000											Sub Bag Perencanaan	
			261 Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			5 jenis laporan keuangan	250.000.000											Sub Bag Keuangan	
			262 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat			2 dokumen	22.650.000											Sub Bag Umum	
			263 Penyusunan/ Reviu Standar Pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan			2 dokumen	20.000.000											Sub Bag Perencanaan	
			264 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA			4 dokumen	17.875.000											Sub Bag Perencanaan	
			265 Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra			1 dokumen	88.100.000											Sub Bag Perencanaan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan		266 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis dan Ranperda/Ranperwal			5 naskah ranperwal	285.000.000											Sub Bag Umum	
			267 Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD			2 jenis dokumen	41.425.000											Sub Bag Perencanaan	
				Persentase puskesmas yang terakreditasi					100%		100%		100%		100%		100,0 %			
				Persentase RS yang terakreditasi					100%		100%		100%		100%		100,0 %			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM					100,0%	117.500.977.475	100,0%	121.500.977.475	100,0%	137.251.075.222,5	100,0%	133.251.075.222,5	100,0 %	0,00		
				Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat					100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0 %			
			Penguatan manajemen Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas					16 puskesmas	286.530.000	16 puskesmas	286.530.000	16 puskesmas	315.183.000	16 puskesmas	315.183.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	Jumlah Kilinik swasta yang mengikuti pembinaan fasilitas kesehatan primer					80 klinik	119.070.000	80 klinik	119.070.000	80 klinik	130.977.000	80 klinik	130.977.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Reakreditasi puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti reakreditasi puskesmas					11 puskesmas	1.065.866.000	1 puskesmas	1.065.866.000	1 puskesmas	1.172.452.600	1 puskesmas	1.172.452.600			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM)					200 orang	2.000.000.000	200 orang	2.000.000.000	200 orang	2.200.000.000	200 orang	2.200.000.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang (Pajak Rokok)	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN					30.638 orang	9.375.228.000	30.638 orang	9.375.228.000	30.638 orang	10.312.750.800	30.638 orang	10.312.750.800			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN					221.053 orang	67.642.218.000	221.053 orang	67.642.218.000	221.053 orang	74.406.439.800	221.053 orang	74.406.439.800			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional					16 FKTP	295.000.000	16 FKTP	295.000.000	16 FKTP	324.500.000	16 FKTP	324.500.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional					16 FKTP	350.000.000	16 FKTP	350.000.000	16 FKTP	385.000.000	16 FKTP	385.000.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Krisis Kesehatan	Jumlah masyarakat yang memahami penanggulangan bencana / krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran					75 orang	197.415.000	75 orang	197.415.000	75 orang	217.156.500	75 orang	217.156.500			Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus					17 fasyankes	93.893.200	17 fasyankes	93.893.200	17 fasyankes	103.282.520	17 fasyankes	103.282.520			Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				kredensialing																
			Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional					25 fasyankes	255.372.500	25 fasyankes	255.372.500	25 fasyankes	280.909.750	25 fasyankes	280.909.750			Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Kecelakaan	Jumlah tenaga kesehatan yang memahami pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan					75 org	164.134.500	75 org	164.134.500	75 org	180.547.950	75 org	180.547.950			Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Penguatan dan Operasional Publik Safety Center	Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat					96 kali pelayanan	1.250.210.000	96 kali pelayanan	1.250.210.000	96 kali pelayanan	1.375.231.000	96 kali pelayanan	1.375.231.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Pembinaan dan Penilaian Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan	Jumlah peserta pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan					6 kelompok Asuhan mandiri pemanfaatan Toga	64.285.000	6 kelompok Asuhan mandiri pemanfaatan Toga	64.285.000	6 kelompok Asuhan mandiri pemanfaatan Toga	70.713.500	6 kelompok Asuhan mandiri pemanfaatan Toga	70.713.500			Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	
			Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah penyehat tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi.					200 Penyehat Tradisional	57.638.000	200 Penyehat Tradisional	57.638.000	200 Penyehat Tradisional	63.401.800	200 Penyehat Tradisional	63.401.800			Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	
			Operasional Puskesmas Kedungkandang	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	948.989.930	12 bulan	948.989.930	12 bulan	1.043.888.923	12 bulan	1.043.888.923			Puskesmas Kedungkandang	
			Operasional Puskesmas Kendalsari	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	614.976.150	12 bulan	614.976.150	12 bulan	676.473.765	12 bulan	676.473.765			Puskesmas Kendalsari	
			Operasional Puskesmas Arjuno	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	537.530.000	12 bulan	537.530.000	12 bulan	591.283.000	12 bulan	591.283.000			Puskesmas Arjuno	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Operasional Puskesmas Bareng	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	612.185.000	12 bulan	612.185.000	12 bulan	673.403.500	12 bulan	673.403.500			Puskedsmas Bareng	
			Operasional Puskesmas Pandanwangi	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	331.897.000	12 bulan	331.897.000	12 bulan	365.086.700	12 bulan	365.086.700			Puskesmas Pandanwangi	
			Operasional Puskesmas Cisadea	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	260.100.000	12 bulan	260.100.000	12 bulan	286.110.000	12 bulan	286.110.000			Puskesmas Cisadea	
			Operasional Puskesmas Kendalkerep	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	877.240.000	12 bulan	877.240.000	12 bulan	964.964.000	12 bulan	964.964.000			Puskesmas Kendalkerep	
			Operasional Puskesmas Mojolangu	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	706.595.000	12 bulan	706.595.000	12 bulan	777.254.500	12 bulan	777.254.500			Puskesmas Mojolangu	
			Operasional Puskesmas Dinoyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	660.660.000	12 bulan	660.660.000	12 bulan	726.726.000	12 bulan	726.726.000			Puskesmas Dinoyo	
			Operasional Puskesmas Janti	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	495.076.000	12 bulan	495.076.000	12 bulan	544.583.600	12 bulan	544.583.600			Puskesmas Janti	
			Operasional Puskesmas Ciptomulyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	506.658.100	12 bulan	506.658.100	12 bulan	557.323.910	12 bulan	557.323.910			Puskesmas Ciptomulyo	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Operasional Puskesmas Mulyorejo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	817.880.000	12 bulan	817.880.000	12 bulan	899.668.000	12 bulan	899.668.000			Puskesmas Mulyorejo	
			Operasional Puskesmas Arjowinangun	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	980.308.300	12 bulan	980.308.300	12 bulan	1.078.339.130	12 bulan	1.078.339.130			Puskesmas Arjowinangun	
			Operasional Puskesmas Gribig	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	607.064.200	12 bulan	607.064.200	12 bulan	667.770.620	12 bulan	667.770.620			Puskesmas Gribig	
			Operasional Puskesmas Polowijen	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	999.961.595	12 bulan	999.961.595	12 bulan	1.099.957.755	12 bulan	1.099.957.755			Puskesmas Polowijen	
			Operasional Puskesmas Rampal Celaket	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	441.180.000	12 bulan	441.180.000	12 bulan	485.298.000	12 bulan	485.298.000			Puskesmas Rampal Celaket	
			Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	2.049.696.000	12 bulan	2.049.696.000	12 bulan	2.254.665.600	12 bulan	2.254.665.600			Puskesmas Kedungkandang	
			Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.430.568.000	12 bulan	1.430.568.000	12 bulan	1.573.624.800	12 bulan	1.573.624.800			Puskesmas Kendalsari	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.174.464.000	12 bulan	1.174.464.000	12 bulan	1.291.910.400	12 bulan	1.291.910.400			Puskesmas Arjuno	
			Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.048.176.000	12 bulan	1.048.176.000	12 bulan	1.152.993.600	12 bulan	1.152.993.600			Puskesmas Bareng	
			Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.376.280.000	12 bulan	1.376.280.000	12 bulan	1.513.908.000	12 bulan	1.513.908.000			Puskesmas Pandanwangi	
			Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	960.264.000	12 bulan	960.264.000	12 bulan	1.056.290.400	12 bulan	1.056.290.400			Puskesmas Cisadea	
			Operasional Puskesmas Kendalkerep (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.700.496.000	12 bulan	1.700.496.000	12 bulan	1.870.545.600	12 bulan	1.870.545.600			Puskesmas Kendalkerep	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	940.320.000	12 bulan	940.320.000	12 bulan	1.034.352.000	12 bulan	1.034.352.000			Puskesmas Mojolangu	
			Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.242.936.000	12 bulan	1.242.936.000	12 bulan	1.367.229.600	12 bulan	1.367.229.600			Puskesmas Ciptomulyo	
			Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.343.808.000	12 bulan	1.343.808.000	12 bulan	1.478.188.800	12 bulan	1.478.188.800			Puskesmas Mulyorejo	
			Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.486.584.000	12 bulan	1.486.584.000	12 bulan	1.635.242.400	12 bulan	1.635.242.400			Puskesmas Arjowinangun	
			Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	1.113.912.000	12 bulan	1.113.912.000	12 bulan	1.225.303.200	12 bulan	1.225.303.200			Puskesmas Gribig	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Operasional Puskesmas Polowijen (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	542.016.000	12 bulan	542.016.000	12 bulan	596.217.600	12 bulan	596.217.600			Puskesmas Polowijen	
			Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN					12 bulan	762.840.000	12 bulan	762.840.000	12 bulan	839.124.000	12 bulan	839.124.000			Puskesmas Rampal Celaket	
			Rehab Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Malang	Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang direhab					6 gedung	4.626.712.000	6 gedung	4.626.712.000	6 gedung	5.089.383.200	6 gedung	5.089.383.200			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pemeliharaan Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Malang	Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara					12 gedung	2.086.744.000	12 gedung	2.086.744.000	12 gedung	2.295.418.400	12 gedung	2.295.418.400			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pengadaan lahan	Jumlah lahan yang diadakan					0	0	1 lahan	4.000.000.000	1 lahan	4.000.000.000	0	0			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembangunan puskesmas	Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun					0	0	0	0	1 gedung	4.000.000.000	1 gedung	4.000.000.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan	Persentase Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang Direhab					100%	13.364.244.000	100%	15.394.969.320	100%	15.392.300.000	100%	18.392.300.000	100%	0,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat					100%		100%		100%		100%		100%			
			Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan /atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN					43.674 orang	13.364.244.000	44.457 orang	13.337.100.000	44.457 orang	13.337.100.000	44.457 orang	13.337.100.000	44.457 orang		Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang dipelihara					0	0	5 gedung	2.055.200.000	5 gedung	2.055.200.000	5 gedung	2.055.200.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui rehabilitasi gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang direhab					0	0	15 gedung	2.669.320	0	0	10 gedung	3.000.000.000			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
			Program BLUD Puskesmas	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)					100%	5.941.996.500	100%	5.941.996.500	100%	6.536.196.150	100%	6.536.196.150	100%	0,00		
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendal Kerep	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	76.488.000	12 bulan	76.488.000	12 bulan	84.136.800	12 bulan	84.136.800			Puskesmas Kendalkerep	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Pandanwangi	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	65.211.000	12 bulan	65.211.000	12 bulan	71.732.100	12 bulan	71.732.100			Puskesmas Pandanwangi	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kedung kandang	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	160.567.000	12 bulan	160.567.000	12 bulan	176.623.700	12 bulan	176.623.700			Puskesmas Kedungkandang	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Gribig	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	53.684.000	12 bulan	53.684.000	12 bulan	59.052.400	12 bulan	59.052.400			Puskesmas Gribig	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjowinangun	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	51.782.000	12 bulan	51.782.000	12 bulan	56.960.200	12 bulan	56.960.200			Puskesmas Arjowinangun	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	2.170.872.000	12 bulan	2.170.872.000	12 bulan	2.387.959.200	12 bulan	2.387.959.200			Puskesmas Janti	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Ciptomulyo	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	49.484.000	12 bulan	49.484.000	12 bulan	54.432.400	12 bulan	54.432.400			Puskesmas Ciptomulyo	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mulyorejo	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	127.541.000	12 bulan	127.541.000	12 bulan	140.295.100	12 bulan	140.295.100			Puskesmas Mulyorejo	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.200.000.000	12 bulan	2.200.000.000			Puskesmas Dinoyo	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mojolangu	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	85.979.000	12 bulan	85.979.000	12 bulan	94.576.900	12 bulan	94.576.900			Puskesmas Mojolangu	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjuno	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	86.461.000	12 bulan	86.461.000	12 bulan	95.107.100	12 bulan	95.107.100			Puskesmas Arjuno	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Bareng	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	76.540.000	12 bulan	76.540.000	12 bulan	84.194.000	12 bulan	84.194.000			Puskesmas Bareng	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Rampal Celaket	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	26.585.000	12 bulan	26.585.000	12 bulan	29.243.500	12 bulan	29.243.500			Puskesmas Rampal Celaket	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Cisadea	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	63.884.000	12 bulan	63.884.000	12 bulan	70.272.400	12 bulan	70.272.400			Puskesmas Cisadea	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendalsari	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	109.619.000	12 bulan	109.619.000	12 bulan	120.580.900	12 bulan	120.580.900			Puskesmas Kendalsari	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Polowijen	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas					12 bulan	108.232.000	12 bulan	108.232.000	12 bulan	119.055.200	12 bulan	119.055.200			Puskesmas Polowijen	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD					16 puskesmas	629.067.500	16 puskesmas	629.067.500	16 puskesmas	691.974.250	16 puskesmas	691.974.250			Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	NDR (Net Death Rate)					<2%	30.000.000.000	<2%	33.000.000.000	<2%	36.300.000.000	<2%	89.930.000.000	<2%	0,00		
			Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan					Akreditasi SNARS 1 paket, bahan perlengkapan praktek 18 jenis, baju Tindakan 300 stel, alat kedokteran umum, gigi, bedah , anak, kebidanan dan kandungan,kedokteran lainnya keseluruhan 60 jenis	8.364.005.300	Akreditasi SNARS 1 paket, bahan perlengkapan praktek 18 jenis, baju Tindakan 300 stel, alat kedokteran umum, gigi, bedah , anak, kebidanan dan kandungan,kedokteran lainnya keseluruhan 60 jenis	9.200.405.830	Akreditasi SNARS 1 paket, bahan perlengkapan praktek 18 jenis, baju Tindakan 300 stel, alat kedokteran umum, gigi, bedah , anak, kebidanan dan kandungan ,kedokteran lainnya keseluruhan 60 jenis	10.120.446.413	Akreditasi SNARS 1 paket, bahan perlengkapan praktek 18 jenis, baju Tindakan 300 stel, alat kedokteran umum, gigi, bedah , anak, kebidanan dan kandungan,kedokteran lainnya keseluruhan 60 jenis	11.132.491.054			RSUD	
			Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan					alat listrik 71 Jenis, perawatan kebersihan & bahan pembersih 19 jenis, obat 31 paket, bahan kimia 40 jenis, perlengkpn praktek 29 jenis, pemel. gedung 1 paket, pemel. Peralatan & mesin 17 jenis	11.923.797.000	alat listrik 71 Jenis, perawatan kebersihan & bahan pembersih 19 jenis, obat 31 paket, bahan kimia 40 jenis, perlengkpn praktek 29 jenis, pemel. gedung 1 paket, pemel. Peralatan & mesin 17 jenis	13.116.176.700	alat listrik 71 Jenis, perawatan kebersihan & bahan pembersih 19 jenis, obat 31 paket, bahan kimia 40 jenis, perlengkpn praktek 29 jenis, pemel. gedung 1 paket, pemel. Peralatan & mesin 17 jenis	14.427.794.370	alat listrik 71 Jenis, perawatan kebersihan & bahan pembersih 19 jenis, obat 31 paket, bahan kimia 40 jenis, perlengkpn praktek 29 jenis, pemel. gedung 1 paket, pemel.	15.870.573.807			RSUD	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
															Peralatan & mesin 17 jenis					
			Operasional Rumah Sakit	Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD					12 bulan	5.506.117.700	12 bulan	6.056.729.470	12 bulan	6.662.402.417	12 bulan	7.328.642.659			RSUD	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit	Jumlah gedung yang terehabilitasi					1 gedung	4.206.080.000	1 gedung	4.626.688.000	1 gedung	5.089.356.800	1 gedung	5.598.292.480			RSUD	
			Pembangunan Gedung Rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun					0	0	0	0	0	0	1 Paket	50.000.000.000			RSUD	
			Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD					30%	10.000.000.000	35%	12.000.000.000	40%	14.000.000.000	50%	16.000.000.000	50%	0,00	RSUD	
			Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD RSUD	Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD					12 bulan	10.000.000.000	12 bulan	12.000.000.000	12 bulan	14.000.000.000	12 bulan	16.000.000.000			RSUD	
			Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Tenaga Medis yang Berkompeten					85%	14.961.643.275	87%	13.170.354.775	89%	14.036.741.853	90%	9.530.257.853		0,00		
				Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Sesuai Standar					100%		100%		100%		100%		100%			
			Perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah peserta bimtek pemakaian obat rasional dan bimtek pengelolaan obat					110 orang	111.500.000	110 orang	111.500.000	110 orang	122.650.000	110 orang	122.650.000			Seksi Kefarmasian	
			Pengawasan, Pembinaan Kefarmasian	Jumlah sarana farmasi, sarana obat tradisional, pengelola jamu yang dibina dan diawasi.					100 sarana farmasi	703.090.000	100 sarana farmasi	703.090.000	100 sarana farmasi	773.399.000	100 sarana farmasi	773.399.000			Seksi Kefarmasian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah sarana pangan yang dibina dan diawasi					300 sarana IRTP	494.450.000	300 sarana IRTP	494.450.000	300 sarana IRTP	543.895.000	300 sarana IRTP	543.895.000			Seksi Kefarmasian	
			Pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	Jumlah Obat obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas					40 item	4.397.355.975	40 item	4.405.398.475	40 item	4.845.938.323	40 item	4.845.938.323			Seksi Kefarmasian	
			Perijinan, Pendataan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang berijin					5500 orang	230.928.700	5500 orang	230.928.700	5500 orang	254.021.570	5500 orang	254.021.570			Seksi SDM Kesehatan	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang yang ditingkatkan kemampuannya					450 orang	2.412.763.800	450 orang	2.412.763.800	450 orang	2.654.040.180	450 orang	2.654.040.180			Seksi SDM Kesehatan	
			Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kota Malang	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memenuhi syarat dalam mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan					46 orang	98.672.800	46 orang	98.672.800	46 orang	108.540.080	46 orang	108.540.080			Seksi SDM Kesehatan	
			Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Malang dalam pembinaan Kelompok Budaya kerja					30 orang	88.267.000	30 orang	88.267.000	30 orang	97.093.700	30 orang	97.093.700			Seksi SDM Kesehatan	
			Peningkatan Kapasitas Petugas Alkes Puskesmas dan Tenaga Aspak	Jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK yang dilatih					152 orang	118.800.000	152 orang	118.800.000	152 orang	130.680.000	152 orang	130.680.000			Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
			Pengadaan Mobil Ambulan Transport	Jumlah mobil ambulance roda 4 yang diadakan untuk puskesmas					14 unit	6.305.815.000	10 unit	4.506.484.000	9 unit	4.506.484.000	0	0			Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Sesuai Standar					100%	3.635.756.000	100%	7.136.596.000	100%	7.386.596.000	100%	7.636.596.000	100%	0,00		
			Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasamad g Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas	Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan					68 item	3.136.596.000	68 item	3.136.596.000	68 item	3.136.596.000	68 item	3.136.596.000			Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
			Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu	Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan					2 jenis	499.160.000	0	0	0	0	0	0			Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	Jumlah Obat obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas					0	0	40 item	4.000.000.000	40 item	4.250.000.000	40 item	4.500.000.000			Seksi Kefarmasian	
	Meningkatnya status kesehatan masyarakat			Angka Usia Harapan Hidup	72,77				72,89		72,96		73,02		73,1		73,1			
			Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					100%	3.323.865.230	100%	3.323.865.230	100%	3.656.251.753	100%	3.656.251.753	100%	0,00		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)					100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)					100%		100%		100%		100%		100%			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV					100%		100%		100%		100%		100%			
				Presentase Kelurahan UCI					93,5%		93,5%		94%		94,5%		94,5%			
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani					601.521 orang	260.000.000	601.521 orang	260.000.000	601.521 orang	286.000.000	601.521 orang	286.000.000			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang dilayani					221.538 orang	175.000.000	69.448 orang	175.000.000	69.448 orang	192.500.000	69.448 orang	192.500.000			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang dilayani					21.529 orang	130.000.000	19.029 orang	130.000.000	19.029 orang	143.000.000	19.029 orang	143.000.000			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang dilayani					1.115 orang	240.000.000	1.115 orang	240.000.000	1.115 orang	264.000.000	1.115 orang	264.000.000			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang dilayani					2.608 orang	825.241.780	2.608 orang	825.241.780	2.608 orang	907.765.958	2.608 orang	907.765.958			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani					1.797 orang	660.486.970	1.797 orang	660.486.970	1.797 orang	726.535.667	1.797 orang	726.535.667			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah orang dengan resiko penyakit menular					14.871 orang	277.981.880	14.871 orang	277.981.880	14.871 orang	305.780.068	14.871 orang	305.780.068			Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelayanan imunisasi	Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah					12.500 bayi, 12.603 baduta, 45.110 anak sekolah	345.500.000	12.500 bayi, 12.603 baduta, 45.110 anak sekolah	345.500.000	12.500 bayi, 12.603 baduta, 45.110 anak sekolah	380.050.000	12.500 bayi, 12.603 baduta, 45.110 anak sekolah	380.050.000			Seksi Surveilans dan Imunisasi	
			Pelayanan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah KLB yang ditangani					<24 kasus	409.654.600	<24 kasus	409.654.600	<24 kasus	450.620.060	<24 kasus	450.620.060			Seksi Surveilans dan Imunisasi	
			Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	115,72	83,89			60,22	31.165.962.520	51,61	31.165.962.520	51,61	34.282.558.772	43,01	34.282.558.772	43,01	0,00		
				Angka Kematian Bayi	6,28	6,71			6,02		6,02		5,94		5,94		5,94			
				Persentase Balita *Stunting*					<24%		<23%		<22%		<21%		<21%			
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang dilayani					13.209 orang	2.700.326.400	13.209 orang	2.700.326.400	13.209 orang	2.970.359.040	13.209 orang	2.970.359.040			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Bersalin yang dilayani					12.608 orang	710.103.300	12.608 orang	710.103.300	12.608 orang	781.113.630	12.608 orang	781.113.630			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani					12.008 bayi	1.276.407.800	12.008 bayi	1.276.407.800	12.008 bayi	1.404.048.580	12.008 bayi	1.404.048.580			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang dilayani					59.322 balita	223.550.300	59.322 balita	223.550.300	59.322 balita	245.905.330	59.322 balita	245.905.330			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar					149.484 orang	641.025.700	149.484 orang	641.025.700	149.484 orang	705.128.270	149.484 orang	705.128.270			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang dilayani					85.904 orang	1.002.470.000	85.904 orang	1.002.470.000	85.904 orang	1.102.717.000	85.904 orang	1.102.717.000			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pelayan Kesehatan dan Gizi	Jumlah Pengadaan PMT					652 posyandu, 6.563 kader posyandu, 63.100 kotak PMT	14.379.230.000	652 posyandu, 6.563 kader posyandu, 63.100 kotak PMT	14.379.230.000	652 posyandu, 6.563 kader posyandu, 63.100 kotak PMT	15.817.153.000	652 posyandu, 6.563 kader posyandu, 63.100 kotak PMT	15.817.153.000			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat	Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat					300 orang	382.325.100	300 orang	382.325.100	300 orang	420.557.610	300 orang	420.557.610			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah penjamah makanan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ;					200 orang penjamah makanan	515.172.500	200 orang penjamah makanan	515.172.500	200 orang penjamah makanan	566.689.750	200 orang penjamah makanan	566.689.750			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas	Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT					30 orang	98.765.500	30 orang	98.765.500	30 orang	108.642.050	30 orang	108.642.050			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Promosi kesehatan	Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat					40 media	2.650.760.170	40 media	2.650.760.170	40 media	2.915.836.187	40 media	2.915.836.187			Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga	Jumlah kelurahan siaga aktif					57 kelurahan	700.000.000	57 kelurahan	700.000.000	57 kelurahan	770.000.000	57 kelurahan	770.000.000			Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri					378 posyandu	700.000.000	378 posyandu	700.000.000	378 posyandu	770.000.000	378 posyandu	770.000.000			Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya	Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri					1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia, 16 pos UKK	700.000.000	1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia, 16 pos UKK	700.000.000	1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia, 16 pos UKK	770.000.000	1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia, 16 pos UKK	770.000.000			Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Pengukuran kebugaran jasmani	Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani					2000 orang	650.010.000	2000 orang	650.010.000	2000 orang	715.011.000	2000 orang	715.011.000			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Operasional Laboratorium Kesehatan	Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat					12 bulan	3.835.815.750	12 bulan	3.835.815.750	12 bulan	4.219.397.325	12 bulan	4.219.397.325			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Masyarakat	Persentase balita stunting					<24%	0	<23%	1.390.000.000	<22%	135.000.000	<21%	1.725.000.000	<21%	0,00		
				Angka Kematian Ibu	115,72	83,89			60,22		51,61		51,61		43,01		43,01	0,00		
				Angka Kematian Bayi	6,28	6,71			6,02		6,02		5,94		5,94		5,94			
			Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan suplemen makanan tambahan	Jumlah suplemen makanan yang diadakan					0	0	2000 buah	90.000.000	3000 buah	135.000.000	5000 buah	225.000.000			Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif / preventif maupun kuratif / rehabilitatif melalui pengadaan media promosi kesehatan	Jumlah media promosi yang diadakan					0	0	1 paket	1.300.000.000	0	0	1 paket	1.500.000.000			Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP					80,5		82,05		83,5		80,4		80,4			
			Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100%	5.105.555.000	100%	4.908.315.200	100%	5.399.146.720	100%	5.399.146.720	100%			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik					100%		100%		100%		100%		100%			
				Nilai Survey Kepuasan Internal					80		80		80		80		80			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik					12 bulan	330.000.000	12 bulan	330.000.000	12 bulan	363.000.000	12 bulan	363.000.000			Sub Bag Umum	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan					1.100 m2	228.560.000	1.100 m2	228.560.000	1.100 m2	251.416.000	1.100 m2	251.416.000			Sub Bag Umum	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor					29 item	443.605.600	29 item	443.605.600	29 item	487.966.160	29 item	487.966.160			Sub Bag Umum	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan					8 item	82.499.200	8 item	82.499.200	8 item	90.749.120	8 item	90.749.120			Sub Bag Umum	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					12 item	22.000.000	12 item	22.000.000	12 item	24.200.000	12 item	24.200.000			Sub Bag Umum	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2 surat kabar	5.000.000	2 surat kabar	5.000.000	2 surat kabar	5.500.000	2 surat kabar	5.500.000			Sub Bag Umum	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman					545.740 kotak	982.860.000	545.740 kotak	982.860.000	545.740 kotak	1.081.146.000	545.740 kotak	1.081.146.000			Sub Bag Umum	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluaran daerah					142 kali	427.603.200	142 kali	427.603.200	142 kali	470.363.520	142 kali	470.363.520			Sub Bag Umum	
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor					14 item	771.250.000	14 item	771.250.000	14 item	848.375.000	14 item	848.375.000			Sub Bag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan					150 orang	128.300.000	75 orang	128.300.000	75 orang	141.130.000	75 orang	141.130.000			Sub Bag Umum	
			Penyusunan dan pengembangan sistem informasi / aplikasi	Jumlah sistem informasi /aplikasi					1 aplikasi	86.876.000	1 aplikasi	86.876.000	1 aplikasi	95.563.600	1 aplikasi	95.563.600			Sub Bag Perencanaan	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja					1 dokumen	29.666.000	1 dokumen	32.632.600	1 dokumen	35.895.860	1 dokumen	35.895.860			Sub Bag Perencanaan	
			Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan					5 jenis laporan	247.080.000	5 jenis laporan	247.080.000	5 jenis laporan	271.788.000	5 jenis laporan	271.788.000			Sub Bag Keuangan	
			Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat					2 dokumen	24.015.000	2 dokumen	24.015.000	2 dokumen	26.416.500	2 dokumen	26.416.500			Sub Bag Umum	
			Penyusunan/ Reviu Standar Pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan					2 dokumen	51.862.000	2 dokumen	57.048.200	2 dokumen	62.753.020	2 dokumen	62.753.020			Sub Bag Perencanaan	
			Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA					4 dokumen	17.064.000	4 dokumen	18.770.400	4 dokumen	20.647.440	4 dokumen	20.647.440			Sub Bag Perencanaan	
			Penyusunan Renja / RKT	Jumlah dokumen Renja / RKT					2 dokumen	59.500.000	2 dokumen	65.450.000	2 dokumen	71.995.000	2 dokumen	71.995.000			Sub Bag Perencanaan	
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah					2 dokumen	35.010.000	2 dokumen	38.511.000	2 dokumen	42.362.100	2 dokumen	42.362.100			Sub Bag Perencanaan	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara					51 unit	50.750.000	51 unit	50.750.000	51 unit	55.825.000	51 unit	55.825.000			Sub Bag Umum	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah					1 dokumen	418.800.000	1 dokumen	418.800.000	1 dokumen	460.680.000	1 dokumen	460.680.000			Sub Bag Umum	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara					1 gedung kantor	202.000.000	1 gedung kantor	202.000.000	1 gedung kantor	222.200.000	1 gedung kantor	222.200.000			Sub Bag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
					2017	2018	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					28 unit kendaraan	122.404.000	28 unit kendaraan	122.404.000	28 unit kendaraan	134.644.400	28 unit kendaraan	134.644.400			Sub Bag Umum	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah					2 unit kendaraan roda empat	10.000.000	2 unit kendaraan roda empat	10.000.000	2 unit kendaraan roda empat	11.000.000	2 unit kendaraan roda empat	11.000.000			Sub Bag Umum	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan					94 unit kendaraan	66.000.000	94 unit kendaraan	66.000.000	94 unit kendaraan	72.600.000	94 unit kendaraan	72.600.000			Sub Bag Umum	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga					21 item	46.300.000	21 item	46.300.000	21 item	50.930.000	21 item	50.930.000			Sub Bag Umum	
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun					1 gedung kantor	216.550.000	0	0	0	0	0	0			Sub Bag Umum	
JUMLAH								124.195.318.000		235.000.000.000		248.933.037.020		274.375.866.470		326.339.382.470		-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, fokus bidang urusan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang ada. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 7.1. Sedangkan tabel Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kesehatan	n.a.	0,814	0,816	0,818	0,820	0,823	0,825	0,825
	% Puskesmas yang terakreditasi	93,75 (15 Pusk)	100	100	100	100	100	100	100
	% RS yang terakreditasi	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Usia Harapan Hidup	72,77	72,83	72,89	72,96	73,02	73,1	72,83	72,83
	Nilai SAKIP	72,87	77,46	75,65	80,5	82,05	83,5	84,9	84,9

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2019 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pelayanan Kesehatan Dasar								
	Persentase puskesmas yang telah mengikuti penilaian / survey akreditasi	93,75	100%	100%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase klinik swasta berijin	n.a	n.a	100%					
2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan , perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan								
	Persentase terpenuhiny a alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	n.a	86,2%	90%					
	Persentase terpenuhiny a ketersediaa n obat, perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	100%	95%	100%					
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi								
	Persentase terpenuhiny a alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	n.a	86,2%	90%					
4	Program Pengawasan obat dan makanan								
	Persentase sampel kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat	n.a	n.a	30%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat	n.a	n.a	60%					
	Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat / standart	n.a	n.a	40%					
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang diawasi dan memenuhi syarat / standart	n.a	n.a	100%					
5	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional								
	Persentase Penyehat tradisional ramuan dan ketrampilan yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	n.a	n.a	10%					
	Persentase kelurahan yang memiliki asuhan mandiri dg SK Kepala Kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas	n.a	n.a	10%					
6	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0	0	100%					
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan								
	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek	n.a	83%	85%					
8	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan								
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang telah terakreditasi dan telah lulus credensialing	n.a	68%	80%					
9	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah								
	NDR (Net Death rate)	8,4	7,6	< 2%					
	Persentase Layanan RS Sesuai Standar	n.a	68%	100%					
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga								
	Persentase balita (0-59 bulan) mendapatkan	74,33%	81,92%	100%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelayanan kesehatan balita sesuai standar								
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	92,03%	98,88%	100%					
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	91,65%	94,64%	100%					
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	89,98%	94,57%	100%					
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
	Persentase balita gizi buruk	0,09	0,06	<0,45					
12	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi								
	Persentase balita stunting	n.a	18,80%	<25%					
13	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit								
	Persentase desa yang melaksanakan Posbindu PTM	100%	100%	100%					
	Prosentase jemaah haji dilakukan	100%	100%	100%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemeriksaan dan pembinaan kesehatan								
	Persentase penemuan penderita kusta yang diobati dan sembuh	100%	75,00%	95%					
	Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani	100%	97,44%	100%					
	Penemuan Penderita Diare	50,82%	48,03%	100%					
	Penemuan Pasien Baru TB - BTA positif	68,03	88,30%	75%					
	Penemuan penderita pneumonia balita	100%	72,55%	80%					
	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	96,56%	91,64%	90%					
	Prosentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%					
	Persentase ODGJ (*Schizofrenia* dan Psikotik) yang ditemukan dan ditangani	n.a	n.a	100%					
	Persentase Penderita DBD yang ditangani dan sembuh	97,14%	98,80%	100%					
	Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu	100%	100%	100%					
14	Program Promosi kesehatan dan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemberdayaan masyarakat								
	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan	16,65%	61,85%	100%					
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri	91,30%	80,00%	82%					
15	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan								
	Prosentase Inspeksi Sanitasi Terhadap TTU TPM	12%	23,65%	92%					
16	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga								
	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Olahraga	n.a	n.a	100%					
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Persentase Ketersediaan / Kecukupan Peralatan dan Perlengkapan Aparatur	100%	100%	100%					
18	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Persentase Gedung/ Kantor yang Terpelihara dengan Baik	100%	100%	100%					
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang Berfungsi dengan Baik								
19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
	Persentase gedung/ kantor yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%					
	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	0,00%	0,00%						
20	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
	Persentase Aparatur yang Memiliki Kinerja Baik	n.a	n.a	100%					
21	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan								
	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun Sesuai Jadwal	100%	100%	100%					

Tabel 7.2.2. Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2020 - 2023 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
	Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM	n.a	n.a		100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	71,95%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
2	Program BLUD Puskesmas								
	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0%	0%		100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah								
	NDR *(Net Death Rate)*	8,4	7,6		<2%	<2%	<2%	<2%	<2%
4	Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah								
	BOR *(Bed Occupancy Rate)* RSUD	11,80%	12,9%		30%	35%	40%	45%	45%
5	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit								
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	n.a	n.a		100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	n.a	n.a		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	n.a	n.a		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	n.a	n.a		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	66,97%	64,70 %		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	n.a	97,44 %		100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Kelurahan UCI	82,46%	73,68 %		100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat								
	Angka Kematian Ibu	115,72	83,89		49,97	41,64	33,31	24,98	24,94
	Angka Kematian Bayi	6,28	6,71		5,41	4,99	4,58	4,16	4,16
	Persentase Balita *Stunting*	n.a.	18,8%		<24%	<24%	<24%	<24%	<24%
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Masyarakat								
	Persentase balita *stunting*	n.a.	18,80 %		<24%	<24%	<24%	<24%	<24%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Angka Kematian Ibu	115,72	83,89		49,97	41,64	33,31	24,98	24,98
	Angka kematian Bayi	6,28	6,71		5,41	4,99	4,58	4,16	4,16
8	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan								
	Persentase Tenaga Medis yang Berkompeten	n.a.	83,0%		85%	87%	89%	90%	90%
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Sesuai Standar	95,00%	95,00 %		100%	100%	100%	100%	100%
9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan								
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Sesuai Standar	95,00%	95,00 %		100%	100%	100%	100%	100%
10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan								
	Persentase Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang Direhab	0,00%	0,00%		100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi	71,95%	100,0 0%		100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat								
11	Program Pelayanan Kesekretariatan								
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai survei Kepuasan internal	78	83,49		80	80	80	80	80

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan memaparkan dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2019, kementrian kesehatan menetapkan kepesertaan seluruh penduduk Indonesia untuk ikut Jaminan Kesehatan Nasional *(Universal Health Coverage)*. Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat merealisasikan target tersebut, terlebih lagi dengan adanya sumber anggaran pajak rokok yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017, pada pasal 2, ayat (3) " Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ". Dan juga anggaran DBHCHT yang diterima oleh pemerintah Kota Malang dengan alokasi yang cukup besar an meningkat setiap juga dapat digunakan untuk mendukung program dan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan , pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada bagian kelima, pasal 8 Ayat 2 (d). "Pembayaran Iuran Jamnan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja".

Dalam pelaksanaan anggaran dan program kegiatan pada Dinas Kesehatan mengacu kepada prinsip –prinsip :

1. Berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan
2. Mengutamakan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat
3. Menerapkan prinsip efisiensi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran program/ kegiatan
4. Mengutamakan skala prioritas dalam menetapkan kegiatan, dan menyesuaikan ketersediaan anggaran pada Pemerintah.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran/ program maupun kegiatan, Dinas Kesehatan melakukan langkah – langkah sbb :

1. Melaksanakan koordinasi secara rutin melalui pertemuan/ rapat yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan.

2. Melaksanakan evaluasi setiap tri bulan dan semester, untuk melihat kemajuan dan kendala yang di temukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan